

**MOTIVASI MASYARAKAT UNTUK MENDUDUKI JABATAN PERANGKAT  
DESA (STUDI KASUS DESA LADANG TEUNGOH KECAMATAN PASIE RAJA  
KABUPATEN ACEH SELATAN)**

**S K R I P S I**



**Diajukan Oleh:**

**RAVIQA DELLA**

**NIM. 170801085**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Politik**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021-2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raviqa Della  
Nim : 170801085  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Motivasi Masyarakat Untuk Penduduk Jabatan Perangkat Desa  
(studi kasus Desa Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja  
Kabupaten Aceh Selatan)

Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

Pembimbing II: Melly Masni, M.I.R

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

Banda Aceh, 10 Oktober 2022

Yang menyatakan,

  
  
  
METERAL  
TEMPEL  
EFDAJX925892642  
(Raviqa Della)

**MOTIVASI MASYARAKAT UNTUK MENDUDUKI JABATAN  
PERANGKAT DESA (Studi Kasus Desa Ladang Teungoh  
Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Politik

Oleh:

**RAVIQA DELLA**

**NIM. 170801085**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Politik**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP.197809172009121006

Pembimbing II,

Melly Masni, M.I.R.  
NIP.199305242020122016

**MOTIVASI MASYARAKAT UNTUK MENDUDUKI JABATAN PERANGKAT  
DESA (Studi Kasus Desa Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh  
Selatan)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik  
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022 M  
21 Jumadil Awal 1444 H

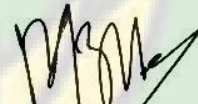
Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



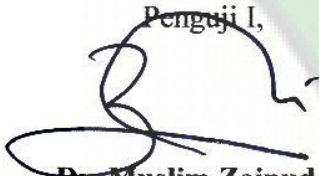
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D.  
NIP. 197809172009121006

Sekretaris,



Melly Mashri, M.I.R.  
NIP. 199305242020122016

Penguji I,



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.  
NIP. 196610231994021001

Penguji II,



Aklima, S.Fil.I., M.A.  
NIP. 198810062019032009

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Darussalam - Banda Aceh**



Dr. Muji Mulia, M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Nama : Raviqa Della  
NIM : 170801085  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/ Ilmu politik  
Judul : Motivasi Masyarakat Untuk Menduduki Jabatan Perangkat Desa (studi kasus Desa Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)  
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
Pembimbing II : Melly Masni, M.I.R

Meningkatnya pendapatan Desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar melalui keberadaan dana Desa menjadi pemicu persoalan di Desa Ladang Teungoh, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah mengetahui gaji Perangkat Desa dinaikkan atau setara dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak 2019, maka warga di Desa Ladang Teungoh berlomba-lomba untuk merebut kekuasaan menjadi perangkat Desa. Sebelum adanya kenaikan tersebut, warga di Desa terkesan acuh dengan jabatan Perangkat Desa. Hal ini dibuktikan dari banyaknya warga yang berusaha untuk mendapatkan ijazah dengan mengikuti ujian ijazah paket C sejak 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang Motivasi Masyarakat Untuk Menduduki Jabatan Sebagai Perangkat Desa. Sumber data yang penulis gunakan adalah perangkat-perangkat desa di Desa Ladang Teungoh. Dari berbagai sumber data, sumber data tersebut penulis gali dengan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, dan metode dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan informasi secara tertulis tentang motivasi masyarakat untuk menduduki jabatan perangkat desa Ladang Teungoh dan informasi lain terkait dengan penelitian ini. Setelah melakukan analisis terhadap data yang berhasil penulis kumpulkan, penulis memperoleh kesimpulan bahwa motivasi perangkat desa melalui 5 (Lima) kebutuhan yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri.

Kata Kunci: *Motivasi Masyarakat, Kekuasaan, Perangkat Desa*

## KATA PENGANTAR

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Motivasi Masyarakat untuk Menduduki Jabatan Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Ladang Teungoh, Kecamatan pasie raja Kabupaten Aceh Selatan)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga syafa'atnya kita peroleh. Aamiin ya Robbal 'Alamin. Penulis menyadari bahwa materi yang terkandung dalam Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan masih banyaknya kekurangan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Dalam penyusunan hingga terselesaikannya Skripsi ini, tentunya tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini menyampaikan ungkapan penghargaan dan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, MAg, selaku rector Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muji Mulia, SAg, MAg, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry.

4. Kepada orangtua yaitu Ayahanda tercinta Syamrin.A dan Ibu Kasriwati yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang, mengasuh, mendidik, membina, menyertakan penulis dalam setiap do'anya serta perhatian moral maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.
5. Kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku pembimbing I dan Ibu Melly Masni, M.I.R. selaku pembimbing II, yang sudah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberi bimbingan yang begitu baik dan penuh perhatian kepada penulis, serta tidak tanggung-tanggung telah memberikan ilmunya yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis dapat melewati semua kendala-kendala yang ada.
6. Kepada seluruh Dosen-dosen FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh terutama dosen Program Studi Ilmu Politik, yang selama perkuliahan telah ikhlas dan tulus mendidik serta mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepada informan yang telah banyak membantu penulis menjawab informasi yang penulis butuhkan.
8. Kepada saudara kandung satu-satunya Zulbairi Asadi yang tidak henti-hentinya memberi semangat untuk penulis.
9. Kepada Sulaimi teman terbaik yang mendukung dan memberi semangat dari proses perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi penulis dari awal sampai akhir.
10. Kepada teman-teman leting 17 Prodi Ilmu Politik yang selalu mensupport dan memberi semangat terhadap penulis walaupun rindu inginkan temu namun merekalah yang menjadi bagian dalam terselesaikan skripsi ini.
11. Serta kepada orang-orang terdekat terdiri dari Herkiman, Halim, Tika Solin, Roja Sartifa, Wirda Satifa, Salvina, Sri Ema Wahyuni, Hendri Kasmansyah, Jonipan, Zami,

Ambasir, Darni, Hafdatul Mutia, Suarmila, Jurdi, Hemanidar, Martini, Erbaita, Reti Famola, teman-teman asrama IDB1, teman-teman seinstansi magang, teman-teman pada masa KPM-DRI, teman-teman IMP3, beserta teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan Namanya satu persatu. Terimakasih kepada kalian yang selalu memberikan semangat dan dorongan terhadap penulis, memberikan tawa dan lelucon yang membuat penulis kembali berenergi dari lelahnya mencari bahan sehingga penulis kembali bersemangat dan termotivasi dengan dukungan yang telah diberikan, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat bagi mereka.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermamfaat bagi kita semua. Aamiin

Banda Aceh, 28 Juli 2022  
Penulis,

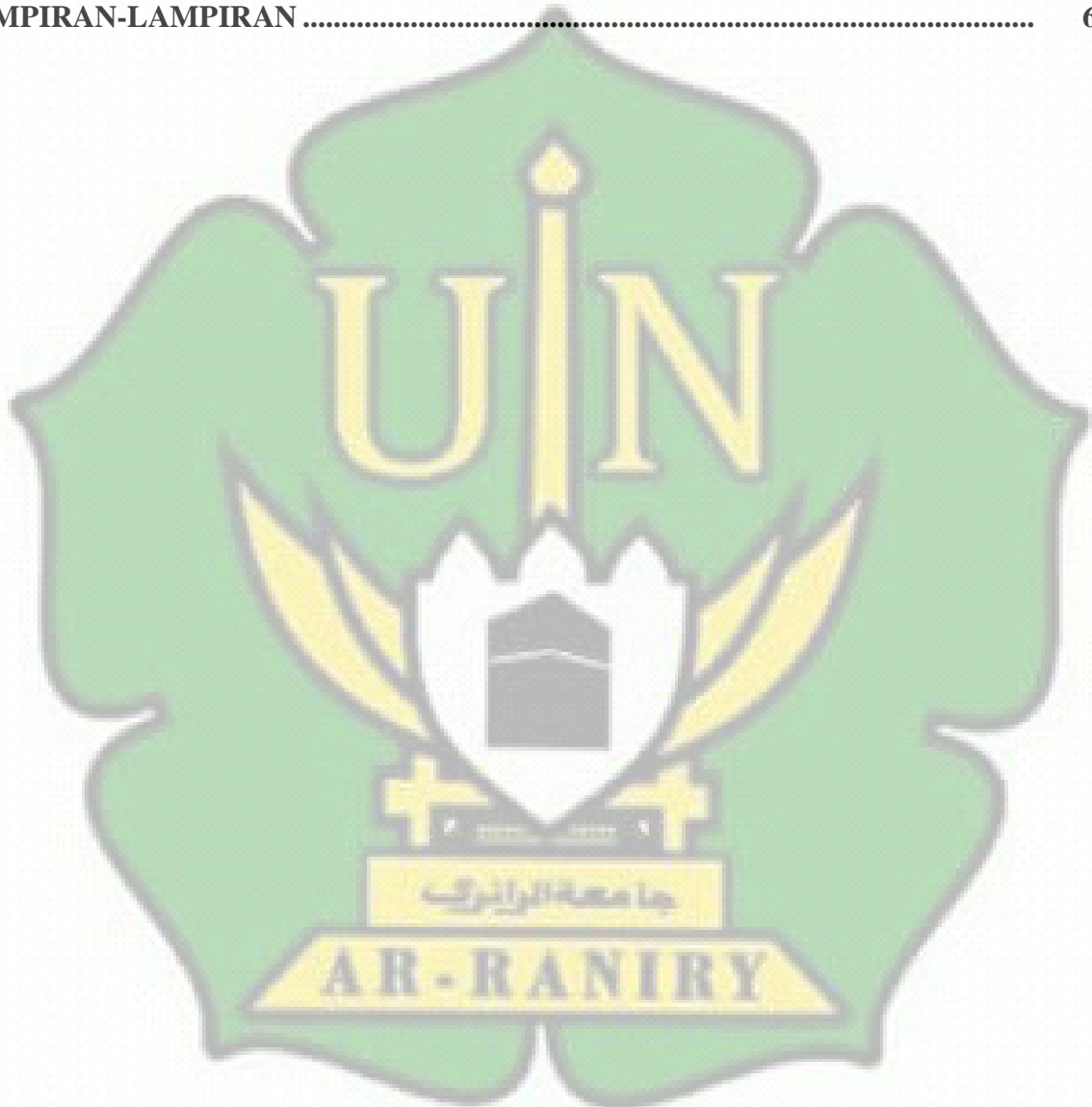
Raviqa Della



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii]</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1. Teori Hierarki Kebutuhan .....	11
2.1.2. Teori john locke tentang kekuasaan rakyat .....	13
2.1.3. Perebutan Jabatan/Kekuasaan .....	13
2.1.4. Pengertian Perangkat Desa .....	17
2.1.5. Sumber Gaji Perangkat Desa .....	19
2.1.6. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa .....	20
2.2.1 Pelaksanaan Teknis .....	24
2.2.2 Pelaksanaan Kewilayahan atau Kepala Dusun .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	28
3.2. Fokus Penelitian .....	29
3.3. Lokasi Penelitian .....	29
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	29
3.5. Informan Penelitian .....	30
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.7. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>34</b>
4.1. Gambaran Umum Desa Ladang Teungoh .....	34
4.2. Motivasi Untuk menjadi Perangkat Desa .....	45
4.2.1. Kebutuhan Fisiologis .....	47
4.2.2. Kebutuhan Rasa Aman .....	49
4.2.3. Kebutuhan Sosial .....	51
4.2.4 Kebutuhan Penghargaan .....	52
4.2.5. Kebutuhan aktualisasi Diri .....	54

4.3 Dampak positif dan negatif ketika menjabat sebagai perangkat desa .....	55
4.2.1. Dampak Positif .....	55
4.2.2. Dampak Negatif .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
5.1. Kesimpulan .....	61
5.2. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>



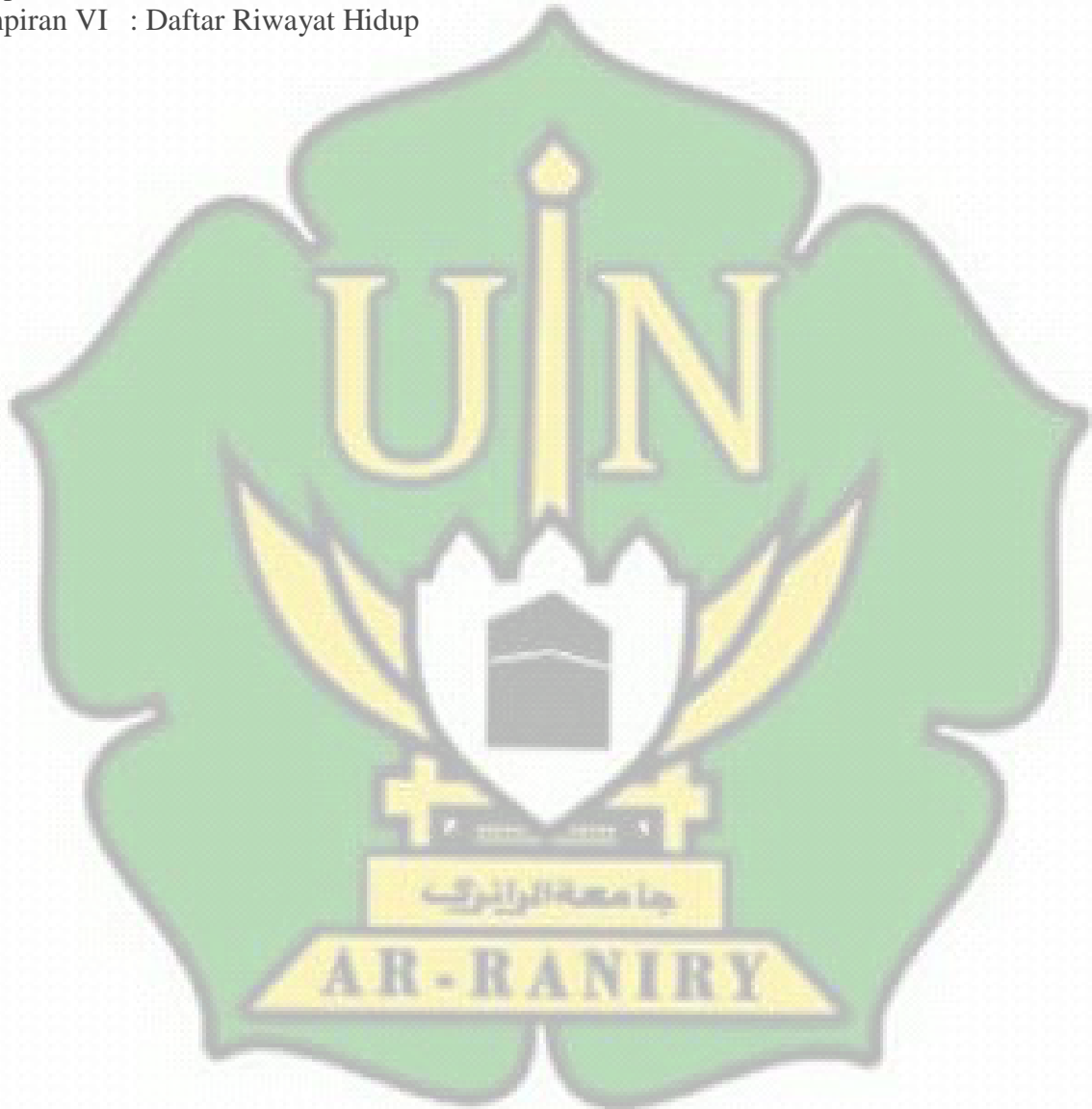
## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Masyarakat Desa Ladang Teungoh .....	36
Tabel 4.2 Data Pekerjaan Masyarakat Ladang Teungoh .....	41
Table 4.3 Data Pendidikan Desa Ladang Teungoh .....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Instrumen Pertanyaan
- Lampiran II : SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran III : Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran IV : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran V : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Demokrasi dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan, demokrasi dipahami pula sebagai sebuah sistem pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau disebut pula dengan istilah pemerintahan rakyat. Sederhananya, demokrasi dilihat sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Adapun salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih pemimpin, baik itu dari tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.<sup>1</sup> Dalam tingkatan yang lebih rendah, dengan demikian demokrasi lokal dapat diartikan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal dengan menggunakan sistem pemilu lokal dan parpol lokal untuk mendudukkan wakil-wakilnya dalam lembaga legislative.<sup>2</sup> Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia, demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya.

---

<sup>1</sup> Nadrilun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia* (Jakarta Timur:PT Balai Pustaka 2012), hlm.8-10

<sup>2</sup> Wahyudi. 2009. *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organisasi Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.<sup>3</sup>

Masyarakat Desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Pemerintahan Desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat umum juga memiliki tradisi dalam menyeleksi pemimpinnya. Tradisi tersebut dari waktu ke waktu telah mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan desa itu sendiri. Saat ini untuk melakukan seleksi pemimpin desa dilakukan melalui pemilihan Kepala Desa dan juga pemilihan Perangkat Desa, pemilihan tersebut meskipun dalam bentuk sederhana adalah sebuah sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks.

Di samping itu, desa dapat dipahami pula sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa sebagai identitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya

---

<sup>3</sup> Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Unik* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003),3.

diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya.<sup>4</sup>

Pemerintahan Desa sendiri terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Rumusan ini berbeda dengan UU No.5 tahun 1979 yang menyebutkan, bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa, dan lembaga masyarakat desa. Lembaga masyarakat desa adalah semacam badan perwakilan desa. Tapi karena LMD (Lembaga Mediasi Desa) dipimpin oleh kepala desa maka kedudukan, peran, fungsi, dan fungsi pokoknya tidak jelas apakah lembaga ini memiliki fungsi legislatif atau eksekutif. UU No.22 tahun 1999 membedakan secara tegas peran badan kepala desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Perangkat desa terdiri atas kepala-kepala urusan, pelaksanaan urusan, dan kepala dusun. Kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi serta pemberian pelayanan. Sedangkan kepala dusun membantu kasi dan kaur pelaksanaan kegiatan anggaran (PKA). Pemerintahan desa memiliki unsur penyelenggaraan desa yang melaksanakan urusan rumah tangga desa, menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.<sup>5</sup>

Sementara itu, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup> Dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Pendapatan asli desa adalah penerimaan dari

---

<sup>4</sup> Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta:DePublis,2016), hlm. 2

<sup>5</sup> Departemen pendidikan nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-3.* ( Balai Pustaka, Jakarta . Gramedia. 2020). hlm.43

<sup>6</sup> W Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta:Grasindo, 2013). Hlm 26.

berbagai usaha pemerintah untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. Pendapatan asli desa berasal dari penerimaan tanah kas desa, pasar /kios desa, pemandian umum yang di urus desa, daya Tarik wisata, bangunan milik desa yang disewakan, kekayaan desa lainnya, swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong-royong masyarakat. Termasuk juga penerimaan yang berasal dari pungutan desa dan hasil usaha desa.

Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar melalui keberadaan dana desa juga turut menjadi pemicu persoalan di Desa Ladang Teungoh, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah mengetahui gaji perangkat desa dinaikkan atau setara dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak 2019, maka warga di Desa Ladang Teungoh berlomba-lomba untuk merebut kekuasaan menjadi perangkat desa. Sebelum adanya kenaikan tersebut, warga di desa terkesan acuh dengan jabatan perangkat desa. Hal ini dibuktikan dari banyaknya warga yang berusaha untuk mendapatkan ijazah dengan mengikuti ujian ijazah paket C sejak 2019. Fenomena ini diyakini sebagai bagian dari upaya mereka untuk dapat menduduki jabatan perangkat desa karena hanya warga yang memiliki ijazah tingkat SMA saja yang bisa mencalonkan diri menjadi perangkat desa.

Dalam pemilihan para kepala dusun II di Desa Ladang Teungoh dapat dilihat pula bagaimana kekuasaan dan uang menjadi modal dasar yang digunakan untuk meraih kemenangan. Disini calon kadus memainkan sumber kekuasaannya untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. Kedua kandidat memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan dukungan dari warga, mulai dari mendatangi rumah warga, memberi uang saku dan lain sebagainya. Di sisi lain terjadinya konflik antara keluarga dan pendukung kandidat terkait dengan perbedaan pandangan dalam mendukung calon kandidat yang



akan mengikuti pemilihan kepala dusun. Banyak faktor yang mempengaruhi konflik salah satunya dengan melakukan *black campaign* untuk menjatuhkan pihak lain yang pada akhirnya akan menimbulkan perasaan benci sehingga menyebabkan konflik antar pendukung.

Menariknya setelah proses pemilihan berlangsung dan masuk pada proses penghitungan suara, terdapat satu surat suara yang rusak sehingga hasil dari perhitungan dua kandidat calon kepala dusun ini memiliki perolehan suara yang sama. Kepala desa dan perangkat desa lainnya menegaskan untuk melaksanakan pemilihan ulang tetapi salah satu kandidat tidak menyetujui kebijakan tersebut. Kepala desa memutuskan untuk mengadakan rapat antara perangkat untuk membahas mengenai hasil pemilihan kadus ini kemudian hasil dari rapat tersebut perangkat memutuskan kedua kandidat tersebut ditetapkan sebagai kepala dusun dengan masa jabatan 5 tahun kedua kepala dusun harus bekerja sama dalam mengurus dan menjalankan tugasnya sebagai kadus di dusun II. Dari hasil keputusan itu banyak warga yang protes terkait dua kepala dusun yang menjabat. Hal inilah yang mendasari mengapa penulis tertarik untuk melihat fenomena perebutan kekuasaan di Desa Ladang Teungoh tersebut, terutama alasan yang mendasari mengapa orang-orang begitu tertarik untuk menjadi perangkat desa.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Apa yang menjadi motivasi masyarakat sehingga mereka sangat ingin menduduki jabatan Perangkat Desa?
2. Bagaimana dampak positif dan negatif yang dirasakan ketika menduduki jabatan Perangkat Desa?

### 1.3 Tujuan penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut maka hal-hal yang ingin penulis capai melalui penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang Motivasi Masyarakat Untuk Menduduki Jabatan Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Ladang Teungoh, Kecamatan Pasie Raja Kabupaten aceh selatan.

#### b. Tujuan Khusus

Dari tujuan umum diatas kemudian memunculkan tujuan khusus untuk mendeskripsikan tentang:

1. Untuk mengetahui motivasi masyarakat untuk menjabat sebagai perangkat desa di desa ladang teungoh kecamatan pasie raja.
2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif ketika menjabat sebagai perangkat desa.
3. Untuk mengetahui harapan dan tanggung jawab perangkat desa setelah menjabat sebagai perangkat desa.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang dapat dikonstrusikan oleh peneliti melalui penelitian ini, adalah sebagai berikut:

#### a. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis, dan bagi para pihak yang bekepentingan tentang Motivasi Untuk Menduduki Jabatan Perangkat Desa.

b. Secara praktis

Adapun kegunaan secara praktis yaitu:

1. Bagi peneliti

Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman yang bermanfaat baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang.

2. Bagi pembaca

Diharapkan dapat memberi tambahan yang terkait dan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini. Informasi dan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi Desa

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi untuk menambah wawasan baru mengenai pemerintahan Desa dan motivasi bagi calon perangkat desa selanjutnya sekaligus sumber bahan baru dalam proses belajar mengajar. Serta diharapkan kepada masyarakat agar menjadikan pengalaman untuk kedepannya dari hasil penelitian ini.

## 2.2 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya sebagian besar menyempurnakan usulan penelitian yang berisikan

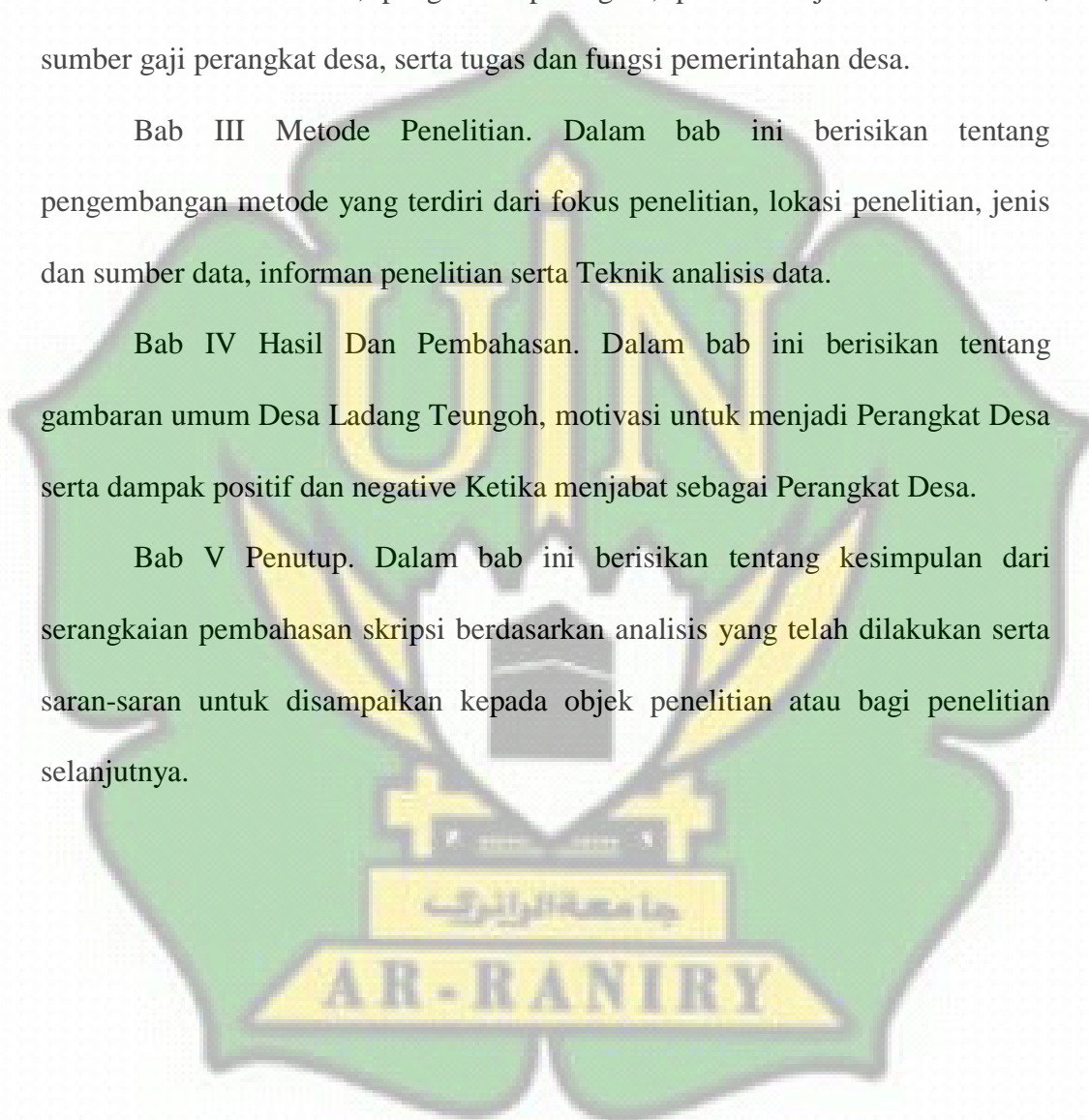
tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara terperinci yang memuat tentang landasan teori, teori hierarki kebutuhan, pengertian perangkat, perebutan jabatan/kekuasaan, sumber gaji perangkat desa, serta tugas dan fungsi pemerintahan desa.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini berisikan tentang pengembangan metode yang terdiri dari fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian serta Teknik analisis data.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan. Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum Desa Ladang Teungoh, motivasi untuk menjadi Perangkat Desa serta dampak positif dan negative Ketika menjabat sebagai Perangkat Desa.

Bab V Penutup. Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta saran-saran untuk disampaikan kepada objek penelitian atau bagi penelitian selanjutnya.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Penelitian M. Rinaldi Aulia (2016) dengan judul skripsi *Analisa Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa (studi kasus pada Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Nagari Campago dan Nagari Sikur, yaitu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawabannya apakah sudah didasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku, apakah prinsip-prinsip pengelolaannya sudah mampu diwujudkan, dan faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.<sup>7</sup>

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pimer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik

---

<sup>7</sup> M. Rinaldi Aulia, skripsi: *Analisa Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman* (Padang: 2015)

wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukam oleh dua nagari tersebut cukup baik.

2. Penelitian Alfarezi (2017) dengan judul Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Studi di pekon Negeri agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Tahun 2016. Dalam penelitian ii Alfarezi menjelaskan bagaimana mekanisme dalam pengangkatan Perangkat Desa di Desa Negeri agung dikaitkan dengan hukum islam dan Undang-undang Desa.
3. Penelitian Surahmadi (2016); Strategi pemenangan politik pasangan IDZA-Narjo dalam pemilukada Kabupaten Brebes Periode 2012-2017, dimana pada penelitian ini munggunakan teori Peter Schorder tentang strategi politik. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh tim sukses pada pemilukada Brebes sangat efektif merebut suara masyarakat.<sup>8</sup>
4. Penelitian Suaib Nafir (2016) ; Strategi Pemenangan Fahmi Massiara-Lukman dalam pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2015 di Kabupaten Majene, di mana pada penelitian ini menggunakan teori Peter Schorder tentang strategi politik. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi ofensif dan defensif yang digunakan pasangan Fahmi Massaira-Lukman berhasil diterapkan pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Majane.<sup>9</sup>
5. Haryokusumo (2011) penelitian dengan judul Menilik Asa Sang Pamong Desa (studi kasus Motivasi Kerja Perngkat Desa di Kabupaten Bayolali), yang menghasilkan fakta bahwa besarnya penghasilan seorang Perangkat Desa akan

---

<sup>8</sup> Surahmadi (2016); *Strategi pemenangan politik pasangan Idra-Narja dalam pemilukada Kabupaten Brebes Periode 2012-2012*. Vol 7 Nomor 2

<sup>9</sup> Suaib Nafir (2016); *Strategi Pemenangan Fahmi Massaira-Lukman dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Majene*, Vol 2 Nomor 2

banyak mempengaruhi motivasi kerja dan peningkatan kerjanya. Haryokusumo menekankan kepada manfaat yang akan di peroleh oleh masyarakat secara langsung apabila gaji perangkat desa mencukupi kebutuhannya.

6. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini peneliti ingin melihat dan mengetahui bagaimana Motivasi Masyarakat Untuk Menduduki Jabatan Perangkat Desa. Dan apa dampak yang di dapatkan serta apa saja keuntungan yang di peroleh bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa bahkan bagi Perangkat Desa yang Sedang bertugas sekarang. Serta peneliti ingin melihat dan menelusuri lebih lanjut tentang permasalahan yang ada di desa Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

## 2.2 Landasan Teori

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang menindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab akibat yang terjadi.

### 2.1.1. Teori Hierarki Kebutuhan

Menurut Abraham maslow kebutuhan adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori hierarki kebutuhan maslow di perkenalkan pada tahun 1943. Secara garis besar Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas, seorang individu haruslah memenuhi

kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu dan menggunakan keinginan tersebut sebagai hal untuk memotivasi mereka. Abraham Maslow juga menambahkan pendapat lain yaitu, bahwa dalam mencapai tingkatan kebutuhan selanjutnya, seseorang dapat menggunakan kuasa motivasi yang dapat digunakan oleh seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka, yaitu menggunakan Motivasi Kekurangan dan Motivasi Perkembangan. Kedua jenis motivasi ini memiliki artinya tersendiri. Untuk motivasi kekurangan diartikan sebagai usaha yang dilakukan individu dalam proses pemenuhan kekurangan mereka. Lalu untuk motivasi perkembangan dapat diartikan sebagai motivasi yang secara alami muncul dari dalam diri individu tersebut dan berguna untuk membuat seorang individu menjadi lebih semangat dalam meraih keinginan dan tujuan mereka.<sup>10</sup> Dalam teori ini memuat lima tingkatan kebutuhan yang harus terpenuhi di masing-masing tingkatannya. Tingkatan kebutuhan tersebut diawali dengan kebutuhan fisiologi, yaitu kebutuhan yang mendasar dan paling kuat serta mendesak pemenuhannya.<sup>11</sup> kebutuhan rasa aman, yaitu keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi.<sup>12</sup> kebutuhan memiliki rasa cinta atau sosial, yaitu menjalin pertemanan atau silaturahmi dengan sesama masyarakat serta beradaptasi dengan lingkungan sekitar.<sup>13</sup> kebutuhan penghargaan, yaitu setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka masing-masing, kebutuhan penghargaan ini dapat dibagi menjadi dua antaranya bentuk menghargai diri sendiri dan bentuk menghargai orang lain. dan kebutuhan

---

<sup>10</sup> [https://www.gramedia.com/litersi/teori-kebutuhan-maslow/diakses\\_16 Juli 2022 time: 21:58](https://www.gramedia.com/litersi/teori-kebutuhan-maslow/diakses_16%20Juli%202022%20time%3A%2021%3A58)

<sup>11</sup> Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Penerjemah A. Supratiknya (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm 43.

<sup>12</sup> Abraham Maslow, *Motivation and Personality (Teori Motivasi dengan Ancangan Hierarki Kebutuhan Manusia)*. Penerjemah Nurul Iman (Jakarta: PT Gramedia, 1984), hlm 43.

<sup>13</sup> Maslow *Motivasion and Personality*. hlm 48.



aktualisasi diri yaitu kebutuhan yang paling tertinggi, selain itu dapat diartikan juga sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri.<sup>14</sup>

### 2.1.2. Teori John Locke tentang kekuasaan rakyat

Menurut John Locke kekuasaan rakyat adalah konsep kekuasaan politis. Dimana setiap individu atau setiap pribadi masyarakat secara bebas menyatakan dirinya bersepakat untuk bersatu dan berkumpul membentuk suatu pemerintahan politis atau persemakmuran dengan suatu tujuan utama yakni untuk menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Di lain pihak Locke juga menegaskan bahwa setiap orang atau individu dalam masyarakat yang menyatakan bersatu dan membentuk suatu persemakmuran secara bebas menyerahkan segala haknya, baik itu hak hidup, hak bebas dan terutama hak milik pribadi kepada negara untuk dilindungi. Di sini negara dipercaya sebagai pemegang kekuasaan atas hidup setiap individu atau rakyat. Memegang kekuasaan tidak dalam arti kekuasaan mutlak atau absolut dengan tindakan sewenang-wenang dan sekehendak hati, melainkan kekuasaan dalam arti yang terbatas dan tidak mutlak. Segala bentuk kekuasaan yang berasal dari negara semata-mata hanya merupakan delegitimasi dari rakyat, yang tidak lain adalah pendiri negara itu sendiri. Dengan demikian, negara hanya bertindak dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh rakyat.<sup>15</sup> Selanjutnya dalam pendapat Locke, ia melihat ada dua bentuk kekuasaan yang telah masyarakat berikan kepada negara atau lembaga pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, Pertama, kekuasaan untuk menjaga kelestarian hidup dari

---

<sup>14</sup> Duane Schultz, *Psikologi Pertumbuhan: Model-model Kepribadian Sehat*, terj. Yustinus (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm 293.

<sup>15</sup> Reza A.A. Wattiwema, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Op.Cit., hlm 20.

setiap masyarakat atau individu dan semua bangsa manusia lain dalam kehidupan bersama sebagai sebuah negara. Di mana negara telah mengatur sebuah undang-undang yang telah dibuat dan ditetapkan untuk membatasi kebebasan dari setiap orang. Kedua, kekuasaan untuk menghukum telah diserahkan kepada negara. Hal ini dilakukan agar orang yang melakukan kejahatan melawan hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang dapat diberikan hukuman sesuai dengan tindakkejahatan yang dilakukan. Jauh dari itu kuasa hukum diberikan kepada negara agar bisa menjaga hak setiap masyarakat atau individu, terutama menjaga hak milik pribadi demi menciptakan kesejahteraan, kedamaian dan ketentraman dalam hidup masyarakat.<sup>16</sup> Dari kedua bentuk kekuasaan ini maka secara eksplisit Locke mencita-citakan sebuah negara hukum. Di mana negara didelegitimasi untuk menerapkan hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang disepakati dan dibuat kepada semua orang atau setiap individu.

### 2.1.3. Perebutan Jabatan/kekuasaan

Di jaman sekarang, banyak orang yang berlomba-lomba dalam meraih kekuasaan, terutama pada jabatan publik seperti anggota legislatif atau kekuasaan di level pemerintahan termasuk desa dan dusun. Dalam ajaran Islam, jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dijaga dan diminta pertanggungjawabannya kelak. Dengan demikian, jabatan merupakan bentuk pengabdian, bukan ditujukan untuk mencari ketenaran serta menumpuk kekayaan. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang

---

<sup>16</sup> John Locke, Op. Cit., nmr. 128, hlm 160.

menginginkan menjadi pemimpin atau memiliki sebuah jabatan penting walaupun besarnya amanah atau tanggung jawab yang harus diemban.

Hal ini tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa dengan menjadi seorang pemimpin, ada serangkaian keuntungan yang dapat diperoleh dengan mudah, seperti keuntungan secara ekonomis serta kekuasaan dan status sosial di tengah masyarakat. Wajar bila kemudian untuk meraih kekuasaan, banyak pihak yang tidak segan-segan melakukan politik uang dengan membeli suara pemilih.

Kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.<sup>17</sup> Adapun jenis-jenis kekuasaan dibagi antara lain sebagai berikut: (a) kekuasaan eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan dimana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan, (b) kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan, (c) kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan dalam penyelesaian hukum, yang didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin pelaksanaan hukum.<sup>18</sup>

Pengertian kekuasaan menurut Max Waber, Miriam Budiarjo, Ibnu Khaldun sebagai berikut:

Max Waber mengatakan, kekuasaan (power) adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan bukan

---

<sup>17</sup> Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan Negara Menular Ke Masyarakat*, Yogyakarta: Galang Press, 2004. hlm. 60

<sup>18</sup> Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, (Malang: SETARA press, 2009), 31.

mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi politik bagi masyarakat. Hak milik kebendaan dan kedudukan adalah sumber kekuasaan. Birokrasi juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, disamping kemampuan khusus dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan ataupun atas dasar peraturan-peraturan hukum tertentu. Jadi kekuasaan terdapat dimana-mana, dalam hubungan sosial maupun didalam organisasi-organisasi sosial.<sup>19</sup>

Miriam Budiarjo mendefenisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.<sup>20</sup>

Ibnu Khaldun mengemukakan kekuasaan itu memiliki segi-segi yang negatif, terutama apabila berada ditangan orang-orang yang telah lupa akan keluhuran budi pekerti yang menjadi dasar dari kekuasaan itu, aspek-aspeknya yang positif jauh melebihi segi-seginya yang negatif. Kelanjutan eksistensi manusia di atas dunia tergantung pada kekuasaan, karena kekuasaan itulah yang merupakan kata listator bagi manusia untuk bekerjasama dan tolong-menolong dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, serta menghalangi orang-orang dari mengikuti kemauan hatinya yang pada umumnya bersifat destruktif. Dan kekuasaan itu memiliki perkembangan sendiri, mulai dari suatu lingkungan yang kecil, dan berkembang terus sampai apabila ia mendapatkan kesempatan mencapai tingkat kekuasaan yang tertinggi.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Jurnal Komunitas Malaysia Journal of Communication Jilid 29(1) 2013:73-97

<sup>20</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992), hlm. 35

<sup>21</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, yang dikutip Kembali oleh A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan Dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*,...,hlm. 141

#### 2.1.4. Pengertian Perangkat Desa

Dalam sebuah Desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya masing-masing. Pemerintahan desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan setempat berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa.<sup>22</sup>

Setiap desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh jajaran Perangkat Desa. Perangkat desa merupakan pejabat pelayanan publik, mereka dituntut untuk bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang di desa serta membantu pekerjaan pemerintah desa dan membantu masyarakat desa terkait urusan dengan pemerintahan desa. Perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati, perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi syarat, apabila perangkat desa melanggar larangan akan diberi sanksi berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya.<sup>23</sup> Perangkat desa dalam hubungan sosial di desa dituakan, ditokohkan dan di percaya oleh warga masyarakat desa untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga desa, melihat betapa pentingnya peran dan tanggung jawab perangkat desa, perangkat desa dituntut untuk memiliki kemampuan, keahlian, tanggung jawab, dan jiwa rela berkorban dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat diatas kepentingan pribadi. perangkat desa adalah seorang

---

<sup>22</sup> I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Daerah di Indonesia, atp Alumni*, Bandung, TAHUN 2008 hlm. 327

<sup>23</sup> WJS Poerwadaminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, hlm. 841

yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa yang bergabung dalam pemerintahan desa.<sup>24</sup>

Perangkat desa bagian dari unsur pemerintahan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (sekdes) dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur pemerontahan Desa dibawah naungan Kepala Desa (kades). Adapun perangkat desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan ( kaur), Kepala Seksi (kasi) dan unsur kewilayahan atau Kepala Dusun (kadus) yang ada di setiap pemerintahan desa. Dan untuk sekarang untuk menjadi seorang Perangkat Desa minimal Pendidikan SMA, karena tugas dari perangkat desa sekarang dikatakan sudah berubah dari tahun ke tahun.

Sejauh mana aparat pemerintah desa dapat mengambil peran sental secara harmonis dan terkoordinasikan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pencalonan aparat pemerintahan desa sangat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan desa lebih baik (*good governance*) diperlukan pengoptimalan kemampuan perangkat desa serta melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan fungsi aparat sebagai pelayanan publik. Peningkatan kemampuan perangkat desa tersebut meliputi peningkatan profesionalisme, birokrasi, dedikasi, disiplin serta sikap yang bersih dari korupsi, dan nepotisme. Motivasi kerja perangkat desa merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan yang diberikan sangat bergantung kepada penyedia jasa pelayanan

---

<sup>24</sup> Rusyan Tabrani, *Membangum efektifitas kinerja kepala desa*, (Jakarta: bumi aksara, 2018) hlm 70.

yaitu perangkat desa, yang juga di pengaruhi salah satunya oleh faktor motivasi kerja.

Dalam skripsi ini yang di maksud dengan perangkat desa adalah pembantu kepala desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>25</sup>

#### 2.1.5. Sumber Gaji Perangkat Desa

Dalam pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa, atas pertimbangan tersebut pemerintah memandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (“PP 47/2015”) sebagai dan yang besumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya diberikan penghasilan tetap dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (“APBD Kabupaten/kota”) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

---

<sup>25</sup> Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2016 *Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*, hlm 2.

Penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dilakukan oleh bupati/kota, dengan ketentuan;

- a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640 setara 120% dan gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang ii/a;
- b. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420 setara 110% dan gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang ii/a;
- c. Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa paling sedikit Rp 2.022.200 setara 100% dan gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang ii/a. Jika ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, maka pembayaran penghasilan dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain dana Desa.

Berdasarkan dari sumber gaji perangkat desa, penulis dapat menyimpulkan bahwa besaran gaji yang diterima oleh perangkat desa mencukupi kebutuhan perangkat desa jika tidak mengharapkan sepenuhnya dari gaji tersebut, karena penyaluran gaji perangkat desa dilakukan dalam jangka waktu empat bulan sekali. Jadi menurut penulis perangkat desa harus memiliki pekerjaan tambahan lainnya.

#### 2.1.6. Tugas atau Fungsi Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah unsur penyelenggaraan desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan



organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai wewenang:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan APB desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa, mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan aturan perundang-undangan.

b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai hak: mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, menerima penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan serta

---

<sup>26</sup> Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT)*

mendapatkan jaminan kesehatan, mendapatkan cuti, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai kewajiban: memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.
- d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan hak dan kewajiban Kepala Desa wajib: menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran Kepada Bupati, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan Kepada Bupati, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi

penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun.<sup>27</sup>

2. Sekretaris Desa, berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Pelaksanaan urusan keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi penghasilan Kepala Desa, BPD, dan Lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan, berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,

---

<sup>27</sup>Lia Sartika Putri, *Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa*, Pekanbaru: 2016, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 02 Juni. 2016, hlm. 169

administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### 2.2.1 Pelaksanaan Teknis

Kepala seksi, berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksanaan tugas operasional. Kepala seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, Menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang tarunan.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### 2.2.2 Pelaksanaan Kewilayahan/ Kepala Dusun

Kepala kewilayahan atau kebutuhan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan. Kepala kewilayahan bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya. Kepala kewilayahan/ Kepala dusun memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> <https://aminjaya.desa.id/page/detail/perangkat-desa> diakses 17 Juli 2022 time: 22:27

➤ Landasan Pemikiran Pengaturan Pemerintahan Desa

Landasan pemikiran pengaturan pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1) Partisipasi

Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

2) Demokratisasi

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagresi melalui badan perwakilan desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan desa.

3) Pemberdayaan masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan desa diabdikan untuk meningkatkan tahap hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Bekerja sebagai pemerintahan desa tentunya tidak sama dengan pegawai yang bertugas di instansi dinas tingkat kabupaten. Apalagi jika dibandingkan dengan karyawan perusahaan swasta perangkat desa adalah abdi masyarakat yang berada ditingkat paling bawah dalam sistem pemerintahan kita. Secara vertikal dia harus mempertanggungjawabkan tugasnya kepada atasan, mulai dari bertanggung jawab dari kepala desa, Camat sampai kepada Bupati. Perangkat desa dalam bekerja langsung berinteraksi dengan masyarakat secara personal, sehingga kinerjanya bisa langsung di nilai oleh orang yang bersangkutan bahkan didikte bagaimana cara dia melaksanakan tugasnya.

Menurut pendapat penulis akan lebih baik lagi jika perangkat desa tidak hanya menguasai peraturan perundang-undangan tentang desa saja. Tetapi juga dengan produk hukum lintas bidang lainnya yang masih ada kaitannya dengan desa. Misalnya saja yang berkaitan dengan Bantuan PKH, jaminan Kesehatan dan lainnya. Tugas dan fungsi dari perangkat desa sudah ditentukan masing-masing menurut urusan atau seksi bidangnya. Dengan menguasai tugas dan fungsinya masing-masing, maka sistem pemerintahan desa akan berjalan maksimal. Segala pekerjaan bisa dengan mudah di koordinir oleh sekretaris desa, sehingga target dari kegiatan pembangunan desa misalnya bisa cepat tercapai dan terealisasi secara maksimal. Sebagai perangkat yang melayani masyarakat secara langsung, perangkat desa dituntut untuk bisa memahami dan mengenal karakter masyarakat di desanya. Baik secara berkelompok maupun perorangan, jika hal ini dikuasai dengan baik akan memudahkan perangkat desa dalam bekerja. Misalnya untuk menentukan suatu kebijakan atau Ketika desa akan menetapkan suatu aturan kepada masyarakat, kepala desa atau perangkat desa tidak ragu lagi akan munculnya respon negatif. Bahkan hal-hal negatif yang kemungkinan akan muncul bisa di minimalisir sebelum aturan itu dijalankan. Memahami karakter masyarakat ini pun dapat bermanfaat untuk perangkat desa menentukan sebuah program kebijakan ke depan demi kemajuan desa.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif yang di maksudkan untuk mengungkapkan gambaran objektif mengenai keadaan yang terdapat pada diri objek yang diteliti. Sedangkan pendekatan kualitatif yang dimaksud dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>29</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah peneliti menggali data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sasaran dan tempat penelitian untuk memecahkan masalah pokok pada skripsi dengan cara mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan untuk melanjutkan penelitian ini, penulis melakukan penelitian langsung dilapangan dengan cara mendatangi kantor Kepala Desa dan juga mendatangi Perangkat-perangkat desa yang berhalangan hadir ke Kantor Desa untuk mencari tau dan mendapatkan informasi tentang “Motivasi Masyarakat untuk Menduduki Jabatan Perangkat Desa (studi kasus Desa Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan).” Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Gofindo Persada, 2001), Hlm. 20.

<sup>30</sup> Sudarto, *Metode Penelitian filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm. 62.



### 3.2 Fokus Penelitian

Pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, maka di perlukan adanya fokus penelitian agar masalah yang diteliti lebih terarah. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada motivasi masyarakat untuk menduduki jabatan perangkat desa serta bagaimana dampak positif dan negatif dalam menduduki jabatan perangkat desa tersebut.

### 3.3 Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ladang Teungoh, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Dengan melihat motivasi masyarakat untuk menduduki jabatan perangkat desa (Studi Kasus Desa Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan). Semua data yang diperoleh akan berdasarkan hasil penggalian informasi dan tatap muka langsung di desa.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua data tersebut antara lain sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Hal yang dilakukan melalui wawancara dengan orang-orang yang dapat dijadikan sumber data. Selanjutnya nanti penulis mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan pemerintahan desa, guna mengetahui Langkah-langkah yang mereka lakukan untuk menduduki jabatan perangkat desa.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berkenaan dengan topik penelitian yang diperoleh dari sumber data tidak langsung, yaitu melalui studi perpustakaan berupa: buku-

buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan skripsi ini.

### 3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informan yang peneliti jumpai adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Yaitu orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah: Perangkat-perangkat desa sebanyak sebelas (11) orang.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode observasi, wawancara dan dokumentasi:

- a. Observasi, yaitu penelitian yang melakukan pengamatan langsung terhadap sasaran dan lokasi penelitian, guna untuk menyelesaikan pokok permasalahan pada skripsi dengan cara mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara langsung dilapangan dengan cara melihat dan juga ikut serta dalam kegiatan pemilihan kepala dusun.<sup>31</sup>
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung pada perangkat-perangkat desa dengan membawa instrumen penelitian sebagai pedoman pertanyaan tentang hal-hal yang akan di tanyakan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan untuk mencari data tentang Motivasi Masyarakat Untuk Menduduki Jabatan Perangkat Desa, yang kemudian akan diperdalam dan dianalisa lebih lanjut.<sup>32</sup> Disini peneliti mendatangi setiap informan yang akan di wawancarai baik di kantor desa,

<sup>31</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006), 120.

<sup>32</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000) hlm.

dilapangan kerja maupun di rumah perangkat desa tersebut. Guna untuk memudahkan peneliti mendapatkan hasil jawaban yang akan diwawancarai.

- c. Dokumentasi, yaitu metode untuk mencari data-data mengenai variabel-variabel yang berupa buku dan dokumen-dokumen lainnya yang dianggap perlu buat penelitian. Teknik ini merupakan Teknik pengumpulan data yang tertulis (yang berbentuk tulisan), sumber data tertulis juga dapat dibedakan menjadi dokumen resmi seperti foto, struktur perangkat desa, dokumen-dokumen desa, foto bukti wawancara dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>33</sup>

### 3.7 Teknik Analisis Data

Sumua data yang dikumpulkan oleh peneliti baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil dari pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>34</sup>

Jika data telah berhasil di kumpulkan dari lokasi penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data kemudian mengajikannya secara tertulis dalam laporan. Adapun data-data tersebut dapat berupa data yang ditemukan dari observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif, yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

- a. Mereduksi data

Reduksi data dalam penelitian ini akan dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah

<sup>33</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.7

<sup>34</sup> Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*. (Surabaya:el.Kaf, 2006), 31.

menanamkan analisis, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Hasil penelitian dilapangan sebagai bahan mentah dirangkai direduksi kemudian disusun supaya lebih sistematis, yang difokuskan pada pokok-pokok dari hasil penelitian untuk mempermudah penelitian dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali. Dari data-data tersebut peneliti membuat catatan atau rangkaian yang disusun secara sistematis.<sup>35</sup>

b. Penyajian data

Dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan adalah dalam bentuk teks naratif agar mengurangi terjadinya peneliti untuk bertindak ceroboh dan secara gegabah didalam mengambil kesimpulan yang tidak berdasar. Sajian data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, serta diagram alur. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.<sup>36</sup>

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Disini kesimpulannya adalah meninjau ulang pada catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, yaitu yang merupakan validasinya. Diperoleh dari data-data hasil wawancara, dokumentasi, kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau dari hasil pengumpulan data.

---

<sup>35</sup> Imam Suparyogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001) hlm.194A

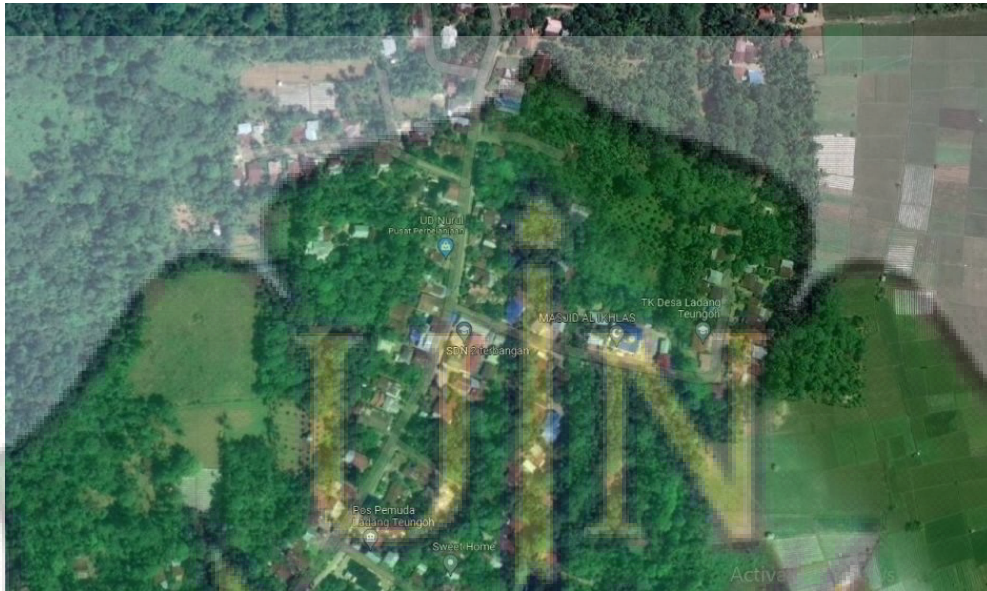
<sup>36</sup>Hengku Wijaya, "*Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*" (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), Hlm.105.

Dalam proses penelitian ada banyak pengalaman yang tidak terlupakan oleh penulis, di sela-sela mencari data dan wawancara, peneliti meluangkan waktu bersama perangkat-perangkat desa untuk berbincang-bincang dan bertukar cerita. Selama dalam proses pengambilan data di Desa Ladang Teungoh, penulis tidak mendapatkan kendala, karena informan yang diwawancarai oleh penulis menggunakan Bahasa daerah (Bahasa Aceh) sehingga peneliti bisa lebih mudah memahami tentang pembahasan yang dijawab. Serta tidak ada unsur rahasia, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam proses pengambilan data.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Desa Ladang Teungoh

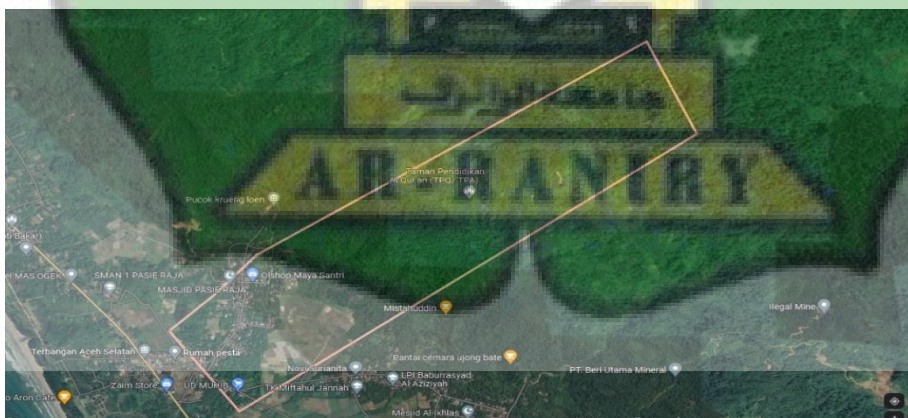


Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, calon wilayah kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari kabupaten Aceh Barat. Pembentukan wilayah Aceh Selatan ditandai dengan disahkan undang-undang darurat nomor 7 tahun 1957 pada 04 november 1956.

Desa Ladang Teungoh merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia. Aceh Selatan terdiri dari 18 kecamatan dan 260 Gampong/Desa. Delapan belas kecamatan tersebut yakni terdiri dari Kecamatan Bakongan, Kecamatan Bakongan Timur, Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Timur, Keacamtan Kota Bahagia, Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kecamatan Meukek, Kecamatan Pasie Raja, Kecamatan Sama Dua, Kecamatan Sawang, Kecamatan Tapaktuan, Kecamatan Trumon, Kecamatan Trumon Tengah dan Kecamatan Trumon Timur.

Kecamatan Pasie Raja merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan ini terdiri dari 21 Gampong/ Desa. Yakni, Desa Ie Mirah, Desa Kampong Baroe, Desa Kampung Baru, Krueng Kalee, Desa Lhok Sialang Cut, Desa Lhok Sialang Rayeuk, Desa Mata Ie, Desa Pantan Bili, Desa Pasi Rasian, Desa Payateuk, Desa Pulo ie 11, Desa Sineubok, Desa Silolo, Desa Teupin Gajah, Desa Ujung Batee, Desa Ujung Padang Asahan, Desa Ujung Padang Rasian, Desa Pante Raja, Desa Pucok Krung, Desa Ladang Tuha dan Desa Ladang Teungoh.<sup>37</sup>

Ladang Teungoh merupakan salah satu desa yang berada di tengah Kabupaten Aceh Selatan. Desa yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup baik dari segi perkebunan, pertanian dan lain-lainnya yang semuanya merupakan pendukung dari maju atau tidaknya masyarakat Desa Ladang teungoh. Selain itu Desa ini juga dilengkapi dengan wisata sungai yang indah dan luas, sehingga keindahannya membuat masyarakat yang berada di Desa sebelah ingin selalu mengunjungi sungai tersebut. Suasana di Desa Ladang Teungoh di pagi hari sangat sejuk, bagaimana tidak Desa ini memiliki sungai dan pergunungan yang tinggi sehingga menciptakan kesejukan dan kenyamanan bagi masyarakat yang ada di Desa ini. Desa ini memiliki batas wilayah administrasi meliputi:<sup>38</sup>



<sup>37</sup> [http://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3065-2962/Kecamatan-Pasie-Raja\\_51229\\_p2k-unrkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3065-2962/Kecamatan-Pasie-Raja_51229_p2k-unrkris.html)/diakses 19 Desember 2022

<sup>38</sup> [http://profilbaru.com/Ladang\\_Teungoh,\\_Pasie\\_Raja,\\_Aceh\\_Selatan/](http://profilbaru.com/Ladang_Teungoh,_Pasie_Raja,_Aceh_Selatan/)diakses 19 Desember 2022

1. Sebelah Utara berbatasan dengan pergunungan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ladang Tuha
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pantan Bili
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pucok Krung

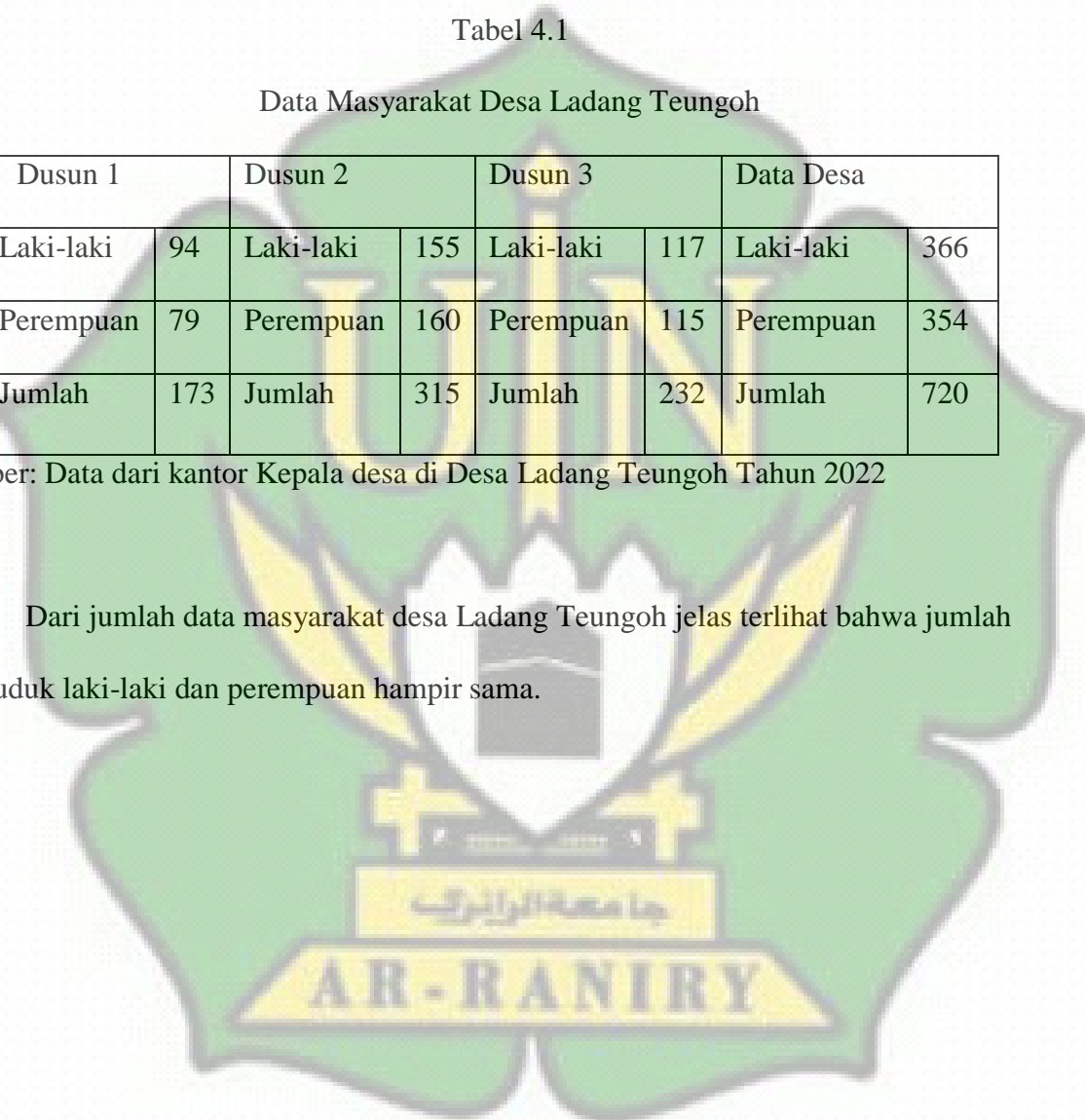
Tabel 4.1

## Data Masyarakat Desa Ladang Teungoh

No	Dusun 1		Dusun 2		Dusun 3		Data Desa	
1	Laki-laki	94	Laki-laki	155	Laki-laki	117	Laki-laki	366
2	Perempuan	79	Perempuan	160	Perempuan	115	Perempuan	354
	Jumlah	173	Jumlah	315	Jumlah	232	Jumlah	720

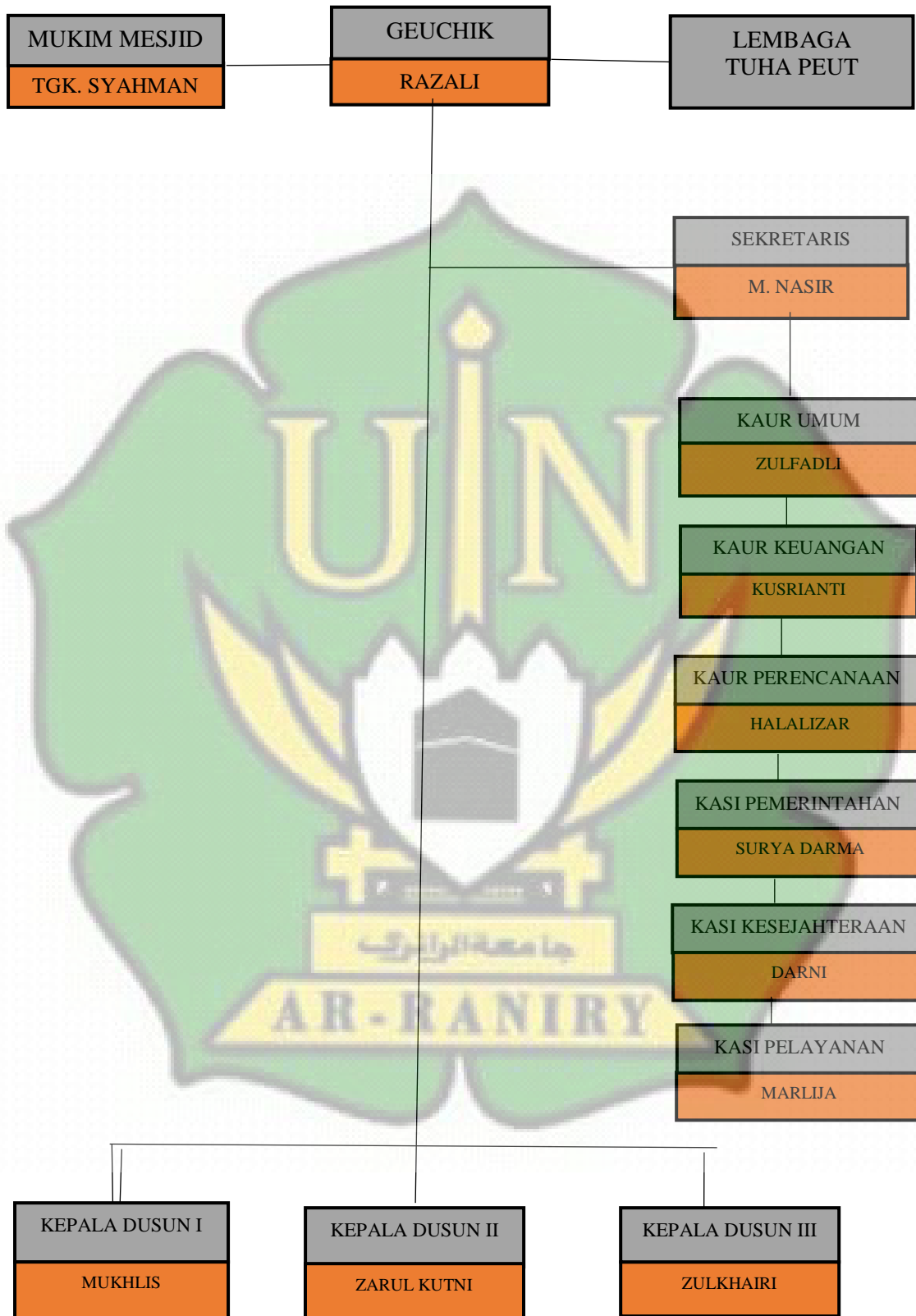
Sumber: Data dari kantor Kepala desa di Desa Ladang Teungoh Tahun 2022

Dari jumlah data masyarakat desa Ladang Teungoh jelas terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama.





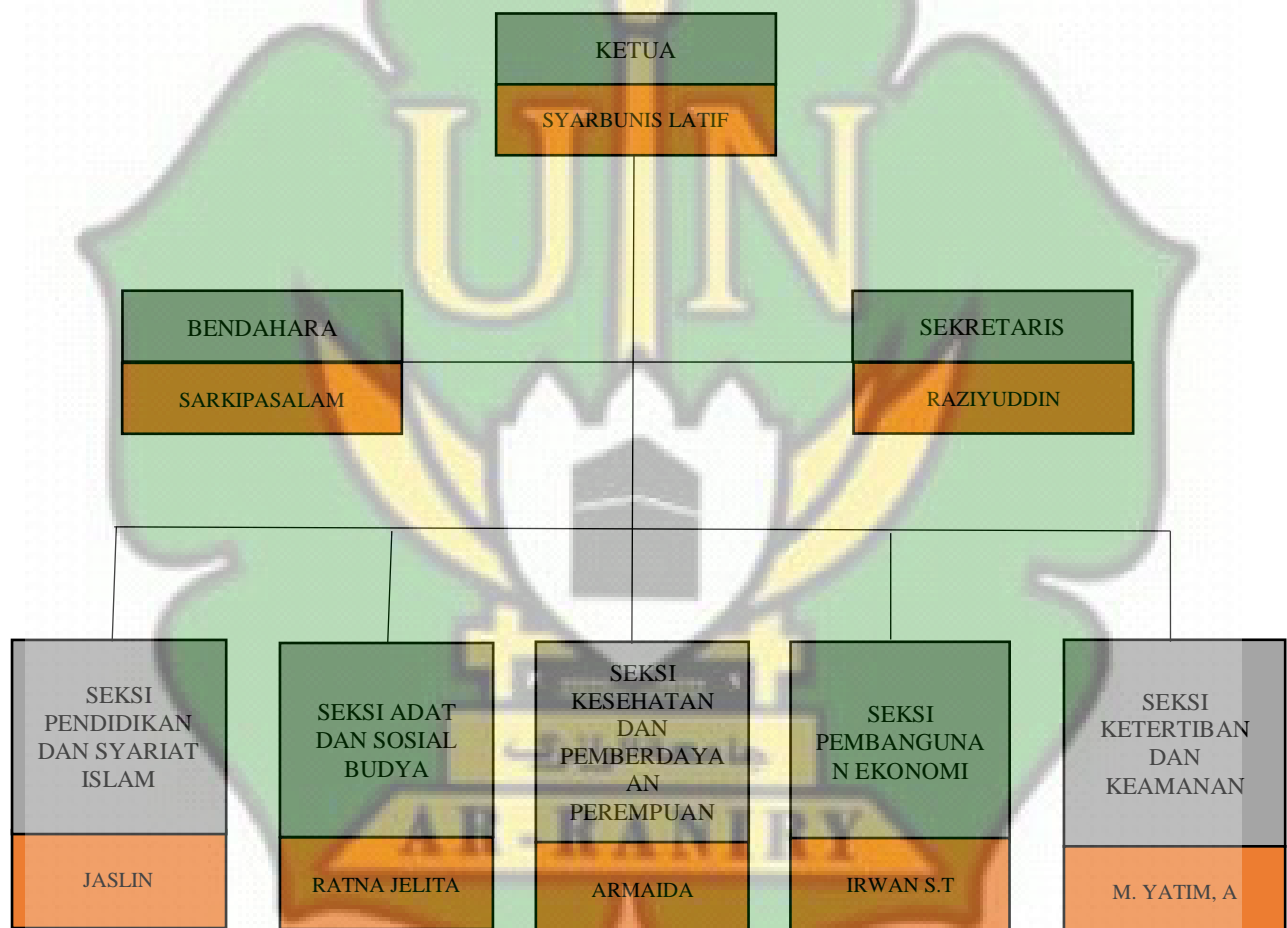
## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA LADANG TEUNGOH



Sumber: Data dari Kantor Kepala Desa Ladang Teungoh

Dari Struktur Organisasi Pemerintahan Desa diatas sama halnya dengan yang ada disetiap pendesaan. Jumlah pegawai dilingkungan pemerintahan desa ladang teungoh satu Kepala Desa, satu Sekretaris Desa, tiga Kepala Urusan (kepala urusan umum, kepala urusan keuangan dan kepala urusan perencanaan), tiga Kepala Seksi (kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan dan kepala seksi pelayanan), dan tiga Kepala Dusun.

### Berikut Struktur Tambahan Organisasi Lembaga Tuha Lapan



Sumber: Data dari Kantor Kepala Desa Ladang Teungoh

Tuha lapan desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan kedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Fungsi tuha lapan desa adalah sebagai berikut:

1. Menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan;
3. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat desa;
5. Menumbuhkembangkan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
6. Ikut serta melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di desa serta memelihara dan mendayagunakan hasil-hasil pembangunan desa.

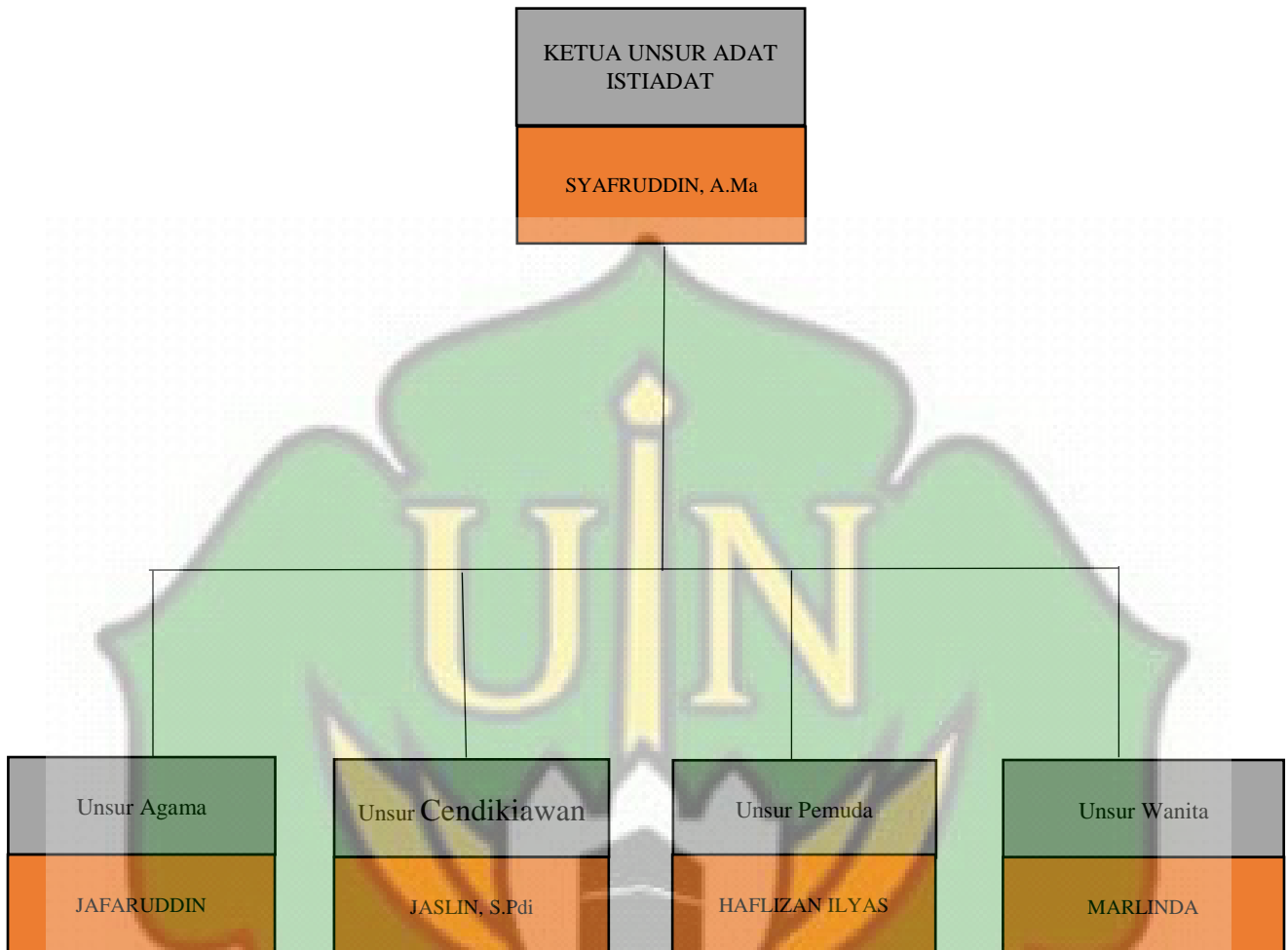
Adapun Tugas Tuha Lapan desa adalah sebagai berikut:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
3. Menyusun rencana, pelaksanaan, pelastarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
4. Menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
5. Menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> <http://www.juragandesa.net/2019/08/kedudukan-tugas-fungsi-kewajiban/diakses> 30 Desember 2022  
time: 19:35

### Berikut Struktur Organisasi Tambahan Lembaga Tuha Peut



Sumber: Data dari Kantor Kepala Desa Ladang Teungoh

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 38 mendefenisikan bahwa Tuha Peut desa adalah wadah perwujudan demokrasi keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tuha peut desa mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

<sup>40</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 *Tentang Pemerintahan Desa*

Adapun Tugas Tuha Peut desa adalah sebagai berikut :

1. Menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
3. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan Lembaga desa lainnya; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.2  
Data Pekerjaan Masyarakat Ladang Teungoh

No	Pekerjaan	Lk	Pr	Jumlah
1	Petani/pekebun	94	18	112
2	PNS	16	13	29
3	Buruh	50	-	50
4	Mahasiswa	13	8	21
5	Karyawan Swasta	9	6	15
6	Karyawan Honorer	7	12	19
7	Pelajar	57	66	123
8	Belum Bekerja	59	98	157
9	Ibu Rumah Tangga	162	-	162
10	Wiraswasta	10	-	10
JUMLAH		477	221	698

Sumber: Data dari kantor kepala desa Ladang Teungoh Tahun 2022

Tabel diatas adalah data pekerjaan masyarakat Ladang Teungoh. Penduduk Desa Ladang Teungoh pada umumnya bekerja sebagai petani. Dari data pekerjaan masyarakat Ladang Teungoh di atas, dapat dilihat bahwa lebih dari setengah masyarakatnya tidak memiliki penghasilan. Ibu rumah tangga merupakan profesi yang paling banyak digeluti oleh perempuan di Ladang Teungoh, dilanjutkan dengan banyaknya masyarakat yang belum bekerja, serta masih menjadi pelajar. Selain itu, hanya 10 orang yang bekerja sebagai wiraswasta .

Kondisi sosial masyarakat di Desa Ladang Teungoh terbilang cukup harmonis. Hubungan dan kerukunan antar sesama, sebagai salah satu kesatuan dalam kehidupan sosial selalu terbina dengan baik. Kehidupan sosial masyarakat di Desa Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dalam sehari-harinya selalu bersikap sopan santun dan ramah tamah, menjunjung tinggi adat istiadat, gotong-royong, dan tolong-menolong antar sesama.

Misalnya saja dalam suatu pelaksanaan tradisi, seperti pesta pernikahan, pesta khitanan/sunatan, perayaan maulid Nabi besar Muhammad Saw, perayaan isra' Miraj, memeriahkan acara HUT RI, memeriahkan hari Raya Idul Fitri dan Idul adha, serta memeriahkan acara penutupan pengajian baik pengajian anak-anak TPA maupun pengajian Ibu-ibu dan lain sebagainya selalu menggunakan cara saling tolong-menolong dan memberikan sumbangan baik berupa materi maupun non materi dan juga dilakukan tanpa pamrih.

Di samping itu, masyarakat di Desa Ladang Teungoh termasuk masyarakat yang sadar akan politik. Itu terlihat dari betapa kuat antusias masyarakat ketika akan memilih siapa yang akan menjadi perwakilan masyarakat, entah itu dalam Pemilu, pemilihan kepala desa maupun pemilihan kepala dusun. Sealain itu ada pula tradisi berpolitik di Desa Ladang Teungoh seperti, memilih secara langsung kepala desa maupun kepala dusunnya.

Pemilihan kepala desa (PILKADES) dan pemilihan kepala dusun (PILKADUS) di Desa Ladang Teungoh dilakukan secara langsung dan demokratis, namun masyarakat biasanya akan lebih memilih calon yang lebih banyak memberikan uang dan juga memberikan pesta makan-makan bersama dengan masyarakat. Kemudian ada juga sebagian masyarakat melakukan taruhan besar-besaran dengan memakai uang sebagai taruhannya pada waktu pemilihan, atas kemenangan siapa yang didukungnya. Setelah pemilihan Kepala Desa atau pemilihan Kepala Dusun selesai dan telah diresmikan bahwa calon satu telah memenangkan pemilihan maka calon lain menerima kekalahan dengan senang hati, meskipun sebelumnya calon satu dengan calon lainnya terlibat persaingan yang sangat sengit dan bahkan sampai pergi ke paranormal untuk menjatuhkan lawan tersebut. Setelah itu dilakukan pesta besar-besaran oleh pemenang Pilkades atau Pilkadus dan mengundang semua masyarakat Desa tak terkecuali para pesaing sebelumnya itu. Ini terlihat bahwa penduduk di desa Ladang Teungoh masih sangat kuat persatuan dan kesatuan demi kemajuan dan kemakmuran Desa.

Pendidikan di Desa Ladang Teungoh memiliki peran yang cukup besar bagi perkembangannya. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran yang hampir dimiliki mayoritas penduduk untuk bersekolah, minimal sampai ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, hal ini didukung dengan adanya prasarana sekolah atau Lembaga Pendidikan formal dan taman kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang ada di Desa tersebut.

Tingkat Pendidikan adalah tahap Pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tinggi kerumitan bahan pengajaran dan cara mengajikan bahan pengajaran. Tingkat Pendidikan sekolah terdiri dari Pendidikan dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan tinggi.<sup>41</sup> Jenjang Pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan

---

<sup>41</sup> Anwar Prabu Mangkunegara, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (bandung : Revika Aditama 2003), hlm 15

peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan kajian. Menurut Tirtarahadja dan La Sulo, jenjang Pendidikan meliputi:<sup>42</sup> Pertama, Pendidikan dasar di selenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Di samping itu juga berfungsi mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pendidikan menengah. Kedua, Jenjang Pendidikan Menengah yang lamanya tiga tahun sesudah Pendidikan dasar, di selenggarakan di SLTA (Sekolng Lanjutan Tingkat Atas) atau satuan Pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan peluasan Pendidikan dasar dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti Pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Pendidikan menengah terdiri dari Pendidikan umum, menengah kejuruan, menengah luar biasa, menengah kedinasan dan menengah keagamaan. Ketiga Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan Pendidikan menengah, yang di selenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, ternologi serta kesenian. Berikut daftar table tingkat Pendidikan masyarakat yang berdasarkan dari tingkat Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, sampai dengan Pendidikan tinggi:

---

<sup>42</sup> Umar Tirtarahadja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hlm. 264-266.



Table 4.3

## Data Pendidikan Desa Ladang Teungoh

NO	Jenjang Pendidikan	Lk	Pr	Jumlah
1	Strata-1	23	31	54 Orang
2	SLTA	-	-	154 Orang
3	SLTP	-	-	189 Orang
4	SD	-	-	192 Orang
5	Tidak Sekolah/tidak tamat SD Sederajat	-	-	109 Orang

Sumber :Data dari kantor kepala desa Ladang Teungoh pada Tahun 2019

Dari tabel diatas jelas terlihat bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak bersekolah atau tidak tamat SD sederajat dan untuk melanjutkan ketingkat universitas juga masih terbilang sedikit. Itu mungkin juga karna faktor ekonomi keluarga sehingga masyarakat sulit untuk bersekolah atau melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

#### 4.2 Motivasi untuk Menjadi Perangkat Desa

Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Oleh sebab itu, motivasi kerja dalam psikologi karya biasa disebut pendorong semangat kerja. Kuat dan lemahnya motivasi kerja seseorang tenaga kerja ikut menentukan besar kecilnya presntasinya.<sup>43</sup>

Motivasi kerja merupakan motivasi yang terjadi pada situasi dan lingkungan kerja yang terdapat pada suatu organisasi atau Lembaga. Keberhasilan dan kegagalan Pendidikan memang sering dikaitkan dengan motivasi kerja. Pada dasarnya manusia selalu

<sup>43</sup> Pandji Anoraga, *Psikologi Kerja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001,) hlm 35.

menginginkan hal yang baik-baik saja sehingga daya pendorong atau penggerak yang memotivasi semangat kerjanya tergantung dari harapan yang akan di peroleh mendatang jika harapan itu menjadi kenyataan maka seseorang akan mencendug meningkatkan motivasi kerjanya.

Motivasi kerja adalah dorongan dari dalam diri dan luar diri seseorang, untuk melakukan sesuatu yang terlihat dari dimensi internal dan dimensi eksternal. <sup>44</sup>Dalam melakukan pekerjaan, biasanya seseorang tidak selamanya hanya di pengaruhi oleh motivasi ekstrensik seperti pemenuhan keuangan semata, tetapi motivasi intrinsik merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Motivasi intrinsik tersebut antara lain kebanggaan akan dirinya dapat melakukan suatu pekerjaan yang orang lain belum tentu mampu melakukannya, kecintaan terhadap pekerjaan itu, atau minat yang besar terhadap tugas atau pekerjaan yang dilakukannya selama ini. Oleh sebab itu, motivasi kerja tidak hanya berwujud kepentingan ekonimis saja, tetapi bisa saja berbentuk kebutuhan psikis untuk lebih melakukan pekerjaan secara aktif.<sup>45</sup> Motivasi menjadi modal utama penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efesian, yang mempengaruhi sistem kerja birokratis sehingga mempunyai tingkat kinerja yang tinggi. Peningkatan motivasi sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dilingkungan birokrasi pemerintahan desa. Hal ini digunakan instrument yang baik untuk mendorong perangkat desa dalam pelaksanaan kerja menuju tata pemerintahan yang baik.

Motivasi yang muncul dari dalam diri manusia tetapi kemunculannya karna ransangan atau dorongan yang disebabkan unsur lain, dalam hal ini tujuan. Tujuan ini menyangkut kebutuhan. Sejalan dengan itu fungsi motivasi bagi manusia antara lain (1) motivasi sebagai motor penggerak manusia ibarat bagan kendaraan; (2) motivasi menentukan arah pembuatan sebagai perwujudan suatu tujuan dan cita-cita; (3) motivasi

---

<sup>44</sup> Wahyusumidjo, *Kememimpinan dan Motivasi*, (Jakarta, Graha Indonesia, 1995), hlm. 177.

<sup>45</sup> Hamzah B Uno, *Teori Motivasi Dan Pengukurannya Analisis Di Bidang Pendidikan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007), hlm 67.

mencegah penyelewengan dari jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu. Semakin jelas tujuannya, semakin jelas pula rintangan jalan yang harus di tempuh; (4) motivasi menyeleksi perbuatan diri, artinya menentukan perbuatan mana yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan mengesampingkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan itu.<sup>46</sup>

Motivasi calon Perangkat Desa didasari oleh lima tingkat kebutuhan yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Setiap calon Perangkat Desa yang ingin mencalonkan diri, para calon memiliki motivasi yang berbeda di mana motivasi tersebut berdasarkan pada ketertarikan atau keinginan para calon untuk mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa dimana ketertarikan tersebut juga disertakan dengan tujuan yang ingin diwujudkan.

#### 4.2.1 Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu baik kebutuhan biologis maupun fisik. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan lainnya salah satunya seperti kebutuhan ekonomi.<sup>47</sup> Begitu pula yang dirasakan oleh Perangkat-perangkat Desa sebelum mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa mereka termotivasi menjadi Perangkat Desa juga salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi untuk memperbaiki perekonomian mereka melalui peran sebagai Perangkat Desa. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Kepala Dusun Desa Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan:

*“Alasan pertama benar karena faktor ekonomi, dengan harapan bisa mencukupi kebutuhan hidup, yang kedua memang permintaan dari masyarakat yang*

<sup>46</sup> Herminanto Sofyan dan Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi Dan Penerapannya Dalam Penelitian*, (Yogyakarta : UNY Press, 2012), hlm 62.

<sup>47</sup> Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Penerjemah A. Supratiknya (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm 43.

*mengajukan untuk menjabat sebagai perangkat desa. Kenapa saya bilang begitu mungkin karna kehidupan sosial saya sebelum menjadi Perangkat saya sering berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan desa jadi mungkin dari sudut pandang itulah sehingga masyarakat mengajukan saya sebagai Perangkat Desa.”<sup>48</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat kebutuhan ekonomi menjadi alasan pertama mengapa posisi Perangkat Desa ini begitu diinginkan. Hal ini hampir sama dengan hasil wawancara peneliti dengan Bendahara Desa Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan:

*“Ini pribadi saya ya, kalau menurut saya ada beberapa faktor sebenarnya Cuma yang menjadi faktor utamanya salah satunya itu (faktor ekonomi). Selain mau dapat pengalaman yang lebih yang menjadi dorongan bagi diri saya sendiri untuk menjadi perangkat yaitu tujuan utamanya mau memperbaiki perekonomian saya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau di perdesaan seperti desa kita ini untuk mencari pekerjaan itu lumayan susah. Kalau kita mau dagang buat penjualan juga agak kurang jadi kalau menurut saya memang itu sih salah satu motivasinya. Ya alhamdulillah memang selama saya menjadi perangkat kalau buat ekonomi lumayan ada peningkatan”.<sup>49</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong mereka untuk menjadi perangkat desa. Dengan menjadi perangkat desa, mereka mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, dengan menjadi perangkat desa, mereka mendapatkan solusi terhadap sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di sekitar mereka.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan kepala Dusun pada tanggal 22 Juni 2022

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bendahara Desa pada tanggal 22 Juni 2022

#### 4.2.2. Kebutuhan Rasa Aman

Kebutuhan rasa aman, merupakan kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya batin dan fisik. Kebutuhan rasa aman ini misalnya adalah rasa aman dari penyakit, rasa aman dari bahaya, rasa aman dari bencana alam, dan rasa aman dari tindakan kriminal. Harapan untuk mendapatkan rasa aman sering pula menjadi motivasi seseorang untuk melakukan suatu upaya tertentu.<sup>50</sup> Akan tetapi, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kaur Desa Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan menyebutkan bahwa kebutuhan rasa aman justru tidak ia dapatkan ketika menjadi perangkat desa, sebagaimana penuturannya sebagai berikut:

*“Berdasarkan yang saya rasakan terkait perlindungan dan keamanan justru dengan menjadi perangkat desa keamanan semakin terancam. Contohnya ketika perangkat menangani suatu kasus pertikaian dalam desa terkadang akan ada satu pihak yang merasa tidak adil ataupun tidak menerima terkait kebijakan yang telah diputuskan oleh perangkat dan hal itu akan menjadi sengketa pribadi antara perangkat dengan pihak yang bermasalah sehingga mengancam keamanan perangkat. Dan terkait perlindungan saya rasa tidak ada perlindungan bagi perangkat desa. Setau saya perlindungan perangkat desa sama seperti perlindungan terhadap masyarakatnya yang sama-sama di lindungi oleh qanun gampong”.*<sup>51</sup>

Hal ini hampir sama dengan hasil wawancara peneliti dengan Kaur Desa Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan:

*“Tidak ada, kalau misalnya buat keamanan sama saja seperti masyarakat pada umumnya juga. Dimana kita kalau mau perlindungan ya lindungi diri sendiri, palingan kita mendapatkan tekanan-tekanan dari luar. Dibilang kita korupsi uang lah, memanipulasi data lah dan semacamnya dan kalau ada hal-hal yang janggal*

---

<sup>50</sup> Abraham Maslow, *Motivation and Personality (Teori Motivasi dengan Ancangan Hierarki Kebutuhan Manusia)*. Penerjemah Nurul Iman (Jakarta: PT Gramedia, 1984), hlm 43.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Kaur pada tanggal 05 Juli 2022

*masyarakat langsung menyalahkan perangkat sedangkan perangkat tidak tahu menahu”.*<sup>52</sup>

Kedua narasumber di atas menjawab dengan jawaban yang hampir sama yaitu bahwa kebutuhan akan rasa aman justru bukan menjadi motivasi mereka karena mereka menyadari bahwa tidak ada perlindungan yang didapatkan dari masyarakat baik secara fisik maupun mental ketika mereka menduduki posisi perangkat desa. Bahkan kedua narasumber tersebut malah merasa terancam. Berbeda halnya dengan salah satu narasumber yang juga peneliti wawancara. Berikut jawaban hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dusun Tengah:

*“Kalau mendapatkan perlindungan ataupun keamanan itu sudah pasti terjamin ya, karena kita sebagai perangkat desa atau istilahnya yang membantu mengurus segala sesuatu yang bersangkutan dengan desa pastinya masyarakat akan menjaga dan melindungi kita baik keamanan fisik maupun emosional.”*<sup>53</sup>

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut, terdapat perbedaan yang dirasakan oleh para perangkat desa terkait dengan kebutuhan rasa aman. Di mana ada yang justru tidak melihat bahwa kebutuhan rasa aman lah yang mendorong mereka untuk mau menduduki posisi perangkat desa, dikarenakan justru mereka merasa begitu banyak tekanan dalam posisi tersebut. Namun demikian, ada pula yang merasakan bahwa kebutuhan rasa aman merupakan motivasinya dikarenakan perlindungan dan penjagaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak yang berjasa dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan desa.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Kaur Desa pada tanggal 05 Juli 2022

<sup>53</sup> Wawancara dengan kepala Dusun tengah pada tanggal 05 Juli 2022

#### 4.2.3 Kebutuhan memiliki rasa cinta atau Sosial

Kebutuhan sosial, merupakan kebutuhan yang meliputi rasa cinta, kasih sayang, dan juga kepemilikan akan sesuatu. Kedudukan ini muncul karena kedudukan seorang individu dalam masyarakat, sehingga individu tersebut harus mampu menyelenggarakan berbagai upaya, agar dipandang layak. Kebutuhan sosial ini adalah kebutuhan akan interaksi antara manusia yang satu dengan yang lain karena dalam kehidupan bermasyarakat tak terlepas dari hubungan antar manusia yang saling timbal balik.<sup>54</sup> Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kaur Desa Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan:

*“Jika kita menjadi perangkat desa kita harus membuat masyarakat nyaman dan suka dengan cara kita bekerja. Karena tujuan kita menjadi perangkat desa itu kan untuk mengabdikan kepada masyarakat, melanjutkan program yang sudah ada dan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab sehingga mereka merasa aman dan tenteram jika kita yang menjadi pemimpin mereka.”<sup>55</sup>*

Hal ini hampir sama dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu Perangkat Desa Ladang Teungoh:

*“Salah satunya iya, karena kebutuhan sosial sangat lah penting bagi semua masyarakat apalagi bagi perangkat desa. Setelah menjadi perangkat desa saya merasakan kebutuhan sosial dengan saling musyawarah bersama untuk mencapai mufakat, ikut serta dalam kegiatan masyarakat, dan saling berkomunikasi baik dengan masyarakat desa.”<sup>56</sup>*

---

<sup>54</sup> Maslow *Motivasion and Personality*. hlm 48.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Kaur desa pada tanggal 05 Juli 2022

<sup>56</sup> Wawancara dengan Perangkat Desa pada tanggal 06 Juli 2022

Hal ini sejalan pula dengan apa yang disampaikan oleh informan lainnya bahwa:

*“Ya walaupun pendapatan yang kita dapatkan sebagai perangkat desa tidak seberapa. Tapi tujuan utama saya bukan untuk meningkatkan perekonomian saya melainkan untuk membantu perangkat-perangkat yang lain dalam menjalankan tugas desa untuk masyarakat bersama.”<sup>57</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa kebutuhan sosial menjadi salah satu motivasi kuat yang mendorong para perangkat desa menduduki posisi tersebut. Meskipun pendapatan yang didapatkan tidak begitu signifikan, bagi mereka pengabdian yang bisa mereka berikan kepada masyarakat telah menjadi salah satu kepuasan tersendiri yang dirasakan.

#### 4.2.4 Kebutuhan Penghargaan

Kebutuhan penghargaan dalam hal ini bukan selalu soal hadiah, tetapi juga menyangkut harga diri. Harga diri ini terbagi menjadi dua, yaitu menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Menghargai diri sendiri ini berarti kepercayaan pada diri sendiri untuk mencapai tujuannya sendiri demi kehormatannya sendiri. Sedangkan penghargaan dari orang lain ini lebih ke arah pengakuan yang didapatkan dari orang lain, seperti terkenal, peningkatan jabatan, dalam pekerjaan serta mendapatkan pujian.<sup>58</sup> Artinya, setiap individu yang bisa mencapai tingkatan ini, maka akan muncul kebutuhan untuk dihormati, rasa ingin dipercaya oleh orang lain, dan menstabilkan diri sendiri, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kasi Desa Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan:

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Perangkat lainnya pada tanggal 06 Juli 2022

<sup>58</sup> Maslow, *Motivation and Personality*, hlm 51.



*“Tentu pasti ada penghargaan dari masyarakat, jika perangkat desa tersebut selalu mengikuti segala aktivitas yang ada di desa. Misalnya di desa ada acara-acara atau pesta baik itu pesta kitanan, turun tanah, pernikahan, maulid nabi, santunan yatim piatu, perayaan tujuh belas agustus, pengajian, pengajian majelas, dan gotong-royong. Maka masyarakat akan menilai perangkat tersebut benar-benar ingin menjadi panutan untuk dicontoh oleh masyarakat lainnya”.*<sup>59</sup>

Begitu pula dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kasi Desa Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan:

*“Salah satunya ya karena ingin dihargai dan dihormati oleh masyarakat. Jika kita menjadi perangkat desa kita harus membuat masyarakat nyaman dan suka dengan cara kita bekerja.”*<sup>60</sup>

Di samping itu, ada pula yang menjadikan kebutuhan akan penghargaan ini akan mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat karena jika mereka melakukan kesalahan, justru bukan pujian yang akan mereka dapatkan.

*“Kalau penghargaan ya tergantung suasana dan perlakuan kita sebagai perangkat desa. Misalnya jika kita membuat sesuatu yang memang masyarakat menyukainya maka kita pasti akan diberi pujian atau penghargaan tapi sebaliknya jika kita sebagai perangkat desa membuat sedikit kesalahan maka kita pasti akan dikatakan sebagai perangkat yang tidak baik atau tidak pantas untuk disebut sebagai perangkat desa.”*<sup>61</sup>

Dari jawaban-jawaban tersebut dapat dilihat bahwa kebutuhan akan penghargaan ini menjadi salah satu poin penting yang mendorong motivasi perangkat desa dalam menjalani tugas-tugasnya.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Kasi Desa pada tanggal 06 Juli 2022

<sup>60</sup> Wawancara dengan Kasi Desa pada tanggal 06 Juli 2022

<sup>61</sup> Wawancara dengan Perangkat lainnya pada tanggal 07 Juli 2022

#### 4.2.5 Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang baru bisa dicapai jika keempat kebutuhan sebelumnya telah terpenuhi. Aktualisasi diri ini adalah pemenuhan potensi dari dirinya sendiri, seperti cita-cita, kematangan mental, keinginan, dan lain sebagainya. Maslow menjelaskan bahwa aktualisasi diri ini adalah kebutuhan individu untuk menentukan keinginan mereka sendiri.<sup>62</sup> Misalnya ketika seseorang berhasil mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan, kemudian ia ingin terus mengembangkan kemampuannya, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kaur Desa Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan:

*“Kalau mengenai potensi menurut saya yang saya miliki dari dulu sampai sekarang ya. Pertama potensinya jujur, bekerja keras, tidak pernah mengeluh apapun komentar dari masyarakat, ya maklumlah ada masyarakat yang pro-kontra jadi apapun pendapat dari masyarakat yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, bantuan yang kita berikan sesuai dan tepat sasaran terus sebagai perangkat desa potensinya menurut saya harus selalu amanah dalam bekerja.”<sup>63</sup>*

Hal ini hampir sama dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan:

*“Potensinya ya harus selalu bersosialisasi baik dengan masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa kita pantas untuk menjadi perangkat di desa tersebut menunjukkan rasa tanggung jawab kita terhadap masyarakat dan harus selalu dekat dengan masyarakat karena itu sangat membantu juga. Menjadi perangkat desa itu tidak mudah kita sering mendapatkan cacian dan makian dari masyarakat maka dari itu kita harus tetap membuat masyarakat untuk tidak berpikiran lagi bahwa perangkat desa itu tidak semua sama sifatnya. Perangkat desa juga harus*

---

<sup>62</sup> Duane Schultz, *Psikologi Pertumbuhan: Model-model Kepribadian Sehat*, terj. Yustinus (Yogyakarta: Kannisius, 1991), hlm 293.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Kaur Desa pada tanggal 07 Juli 2022

*merasakan atau mengetahui keluhan apa yang sedang dirasakan oleh masyarakatnya sehingga ia dapat membantu masyarakat di desa tersebut.”<sup>64</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa menjadi perangkat desa telah memungkinkan mereka untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang memang telah memilikinya. Potensi-potensi yang dimaksud di antaranya adalah rasa tanggung jawab yang penuh, jujur dalam segala hal, tidak suka mengeluh dan lain-lain. Dengan potensi-potensi tersebutlah, mereka mampu mendengarkan berbagai keluhan masyarakat serta berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

#### 4.3 Dampak positif dan negatif ketika Menjabat sebagai Perangkat Desa

Bagi perangkat desa yang sudah terpilih, kepercayaan yang ditunjukkan oleh warga desa dalam pemilihan perangkat desa hendaknya dijadikan sebagai motivasi lebih untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai perangkat desa. Tentunya banyak sekali tantangan yang akan dihadapi setelah terpilih menjadi perangkat desa. Berikut dampak positif dan negatif yang dirasakan setelah menduduki posisi perangkat desa.

##### 4.3.1 Dampak Positif

Adapun dampak positif yang dirasakan oleh perangkat desa ketika menduduki posisi tersebut adalah Pertama, Mudah mendapatkan informasi. Sebagai orang yang menduduki posisi pemerintahan di desa, para pejabat desa menjadi orang-orang pertama yang mengetahui berbagai informasi yang diberitahukan oleh pemerintah daerah. Seperti hasil wawancara peneliti dengan salah satu Perangkat Desa Ladang Teungoh:

*“Tentu lebih mudah mendapatkan informasi karena kami sebagai perangkat desa ada sejenis grup yang bisa menginformasikan dari dinas sosial atau dinas-dinas lain gitu, kami bisa mendapatkan informasi lebih mudah.”<sup>65</sup>*

<sup>64</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Desa pada tanggal 07 Juli 2022

<sup>65</sup> Wawancara dengan Perangkat Desa pada tanggal 07 Juli 2022

Kedua, mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Dengan menjadi Perangkat Desa, mereka merasakan bahwa dirinya lebih dihormati dan disegani di dalam desa tersebut. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Perangkat Desa:

*“Karena kami sebagai perangkat desa itu kan yang mengurus segala sesuatu atau semua masalah di desa jadi masyarakat pasti akan menghormati dan menyegani kami sebagai perangkat desa. Jika tidak, mungkin mereka pasti berpendapat bahwa kami tidak akan mau membantu mereka dalam pengurusan data atau surat-menyurat yang di perlukan masyarakat di desa.”<sup>66</sup>*

Dari penuturan tersebut, terlihat bahwa pekerjaan sebagai perangkat desa telah meningkatkan posisi mereka di mata masyarakat sehingga lebih dihormati dan dihargai oleh masyarakat sekitar.

Ketiga, mendapatkan keuntungan finansial. Sebagaimana dari hasil wawancara sebelumnya di sub pembahasan kebutuhan fisiologis, dapat dengan jelas dilihat bagaimana kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi dengan bergabungnya mereka ke dalam posisi perangkat desa. Keempat, kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. Dengan menjadi perangkat desa, informan merasakan kepuasan tersendiri di mana mereka dapat lebih leluasa membantu dan melayani masyarakat di sekitarnya. Hal ini sebagaimana yang tergambar dari hasil wawancara berikut ini:

*“Keuntungan yang saya dapatkan atau rasakan dengan menjadi perangkat desa saya bisa mendapatkan poin-poin tertentu. Pertama saya bisa mendapatkan penghasilan dari pemerintah, kedua saya juga bisa merasakan suatu kepuasan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari desa seperti yang sedang kesusahan atau yang memerlukan bantuan dari orang lain. Ya kami sebagai*

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Perangkat Desa pada tanggal 07 Juli 2022

*perangkat desa merasa puas bisa membantu masyarakat yang memerlukan bantuan dari kami.”<sup>67</sup>*

#### 4.3.2 Dampak Negatif

Selain mendapatkan berbagai dampak positif, ternyata terdapat pula dampak negatif yang dirasakan ketika menjabat menjadi perangkat desa. Pertama, menjadi sorotan masyarakat. Saat menduduki perangkat desa, bagaimanapun dan apapun yang dilakukan oleh perangkat desa selalu terlihat atau tersorot oleh masyarakat. Seperti hasil wawancara peneliti dengan perangkat desa:

*“iya hal utama yang akan dikomentari oleh masyarakat yaitu dari segi pakaian kita sehari-hari sebagai perangkat. Sebagai perangkat desa kami diharuskan untuk selalu berpakaian sopan baik di dalam rumah maupun diluar rumah, baik di desa sendiri maupun keluar desa yang lain. Jika ada keganjalan dari segi pakaian kami sebagai perangkat desa ini siap-siap buat tutup telinga dari gosipan masyarakat desa.”*

Begitu pula dengan hasil wawancara berikut ini:

*“Jika perangkat desa membuat sedikit saja permasalahan yang kami lakukan maka pasti akan dinilai buruk dan masyarakat langsung mengklaim bahwa perangkat tersebut tidak pantas dicontoh dan dikatakan sebagai pengurus desa.”<sup>68</sup>*

Demikian pula dengan wawancara berikut ini:

*“Harus ikut serta dalam berbagai aktivitas di desa. Jika tidak, maka kami sebagai perangkat desa akan menjadi pokok paling utama yang ditanyakan atau yang dipermasalahkan oleh masyarakat.”<sup>69</sup>*

<sup>67</sup> Wawancara dengan Perangkat Desa pada tanggal 07 Juli 2022

<sup>68</sup> Wawancara dengan Perangkat Desa pada tanggal 07 Juli 2022

<sup>69</sup> Wawancara dengan Perangkat Desa pada tanggal 09 Juli 2022

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa ada berbagai kesulitan yang dirasakan oleh para perangkat desa karena menjadi sorotan masyarakat. Di antaranya adalah masalah penampilan dan tindak tanduk yang mereka lakukan, di mana mereka selalu diawasi dan dituntut untuk memberikan contoh yang terbaik di mana pun mereka berada.

Kedua, menjadi sasaran kecurigaan masyarakat. Dengan menjadi perangkat desa, selain mendapatkan penghormatan dari masyarakat, tak jarang pula perangkat desa menjadi sasaran kecurigaan oleh masyarakat di sekitarnya. Hal ini tergambar dari adanya tuduhan dari masyarakat bahwa jika ada bantuan sosial atau sejenisnya, maka perangkat desa akan mengutamakan keluarga dan saudara terdekatnya. Seperti hasil wawancara peneliti dengan perangkat Desa Ladang Teungoh berikut ini:

*“Ini juga selalu menjadi permasalahan di desa kita ini karena sebetulnya setiap bantuan sosial atau bantuan dalam jenis apapun. Itu bukan perangkat desa yang memilih. Oh masyarakat A yang boleh atau masyarakat B tidak boleh diberi bantuan. Sebenarnya segala jenis bantuan yang diberikan itu semua data dari pemerintahan pusat, memang diberikan kepada masyarakat yang layak menerimanya. Kami sebagai perangkat cuma menjalankan dan melaksanakan tugas tersebut dan kami tidak berhat untuk memilih-milih antara saudara dekat kami dengan masyarakat lainnya.”<sup>70</sup>*

Selain itu, tak jarang pula perangkat desa dituduh memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sebagaimana yang digambarkan dalam wawancara berikut ini:

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Perangkat Desa pada tanggal 08 Juli 2022

*“Masyarakat selalu mengira bahwa perangkat desa korupsi dalam hal bantuan sosial. saya pribadi merasakan sulit mendapat bantuan sosial. Kenapa sulit? karna kami sebagai perangkat desa terkadang ada aturannya bahwa masyarakat lebih diutamakan dibandingkan pengurus desa atau perangkat desa jadi kami tidak berhak dan tidak layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.”<sup>71</sup>*

Keterangan di atas menjelaskan bahwa secara garis besar yang menjadi dampak positif untuk menduduki jabatan perangkat desa yaitu, pertama mudah mendapatkan informasi, kedua mendapatkan penghargaan, ketiga mendapatkan keuntungan finansial, keempat, dapat merasakan suatu kepuasan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari desa seperti yang sedang kesusahan atau yang memerlukan bantuan dari orang lain. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, pertama menjadi sorotan masyarakat, dan yang kedua selalu menjadi sasaran kecurigaan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, observasi lapangan, kajian dokumen dan analisis sesuai dengan pokok penyajian data. Langkah kerja peneliti dimulai dari fokus penelitian yaitu motivasi masyarakat untuk menduduki jabatan perangkat desa serta bagaimana dampak positif dan negatif dalam menduduki jabatan perangkat desa. Jadi, menurut penulis setelah mengamati dan mendengar langsung berbagai penjelasan-penjelasan atau lebih tepatnya jawaban dari perangkat-perangkat Desa Ladang Teungoh Motivasi Masyarakat Untuk Menduduki Jabatan Perangkat Desa itu sangat lah kuat berbagai motivasi timbul baik dari diri sendiri maupun dorongan dari orang tua sehingga mereka berlomba-lomba untuk merebut kekuasaan tersebut agar mereka ingin sama-sama memajukan atau membentuk kerja sama yang lebih baik, menambah perekonomian, menambah pengalaman kerja, mendapatkan penghargaan, lebih mudah mendapatkan informasi, lebih dihormati oleh masyarakat, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai perangkat desa dan selalu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat demi

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Perangkat Desa pada tanggal 08 Juli 2022

kemajuan desa. Setelah peneliti turun kelapangan dan mencari tau mengenai kinerja kedua kepala dusun yang menjabat sebagai kepala dusun II di Desa Ladang Teungoh, peneliti mendapatkan informasi bahwa selama enam (6) bulan sekali kedua kepala dusun tersebut bergatian tugas. Begitu juga dengan gaji yang didapatkan oleh kedua kepala dusun tersebut gaji yang didapatkan atau diperoleh selama menjabat sebagai kepala dusun dibagi dua. Pelayanan yang diberikan oleh kedua kepala dusun juga tidak di permasalahan oleh masyarakat di desa tersebut. Dan sejauh ini mereka masih menjabat sebagai kepala dusun di desa Ladang Teungoh dan tidak didapatkan keganjalan walaupun terdengar aneh bahkan belum terjadi di desa-desa manapun dengan memiliki dua kepala dusun dalam satu dusun.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupten Aceh Selatan mengenai “Motivasi Masyarakat Untuk Menduduki Jabatan Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Ladang Teungoh, Kecamatan Pasie Raja Kabupaten aceh selatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Motivasi perangkat desa didasari oleh lima tingkat kebutuhan yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Hal ini telah diketahui ketika penulis melakukan wawancara langsung dengan perangkat desa.

Setiap Perangkat Desa sebelumnya memiliki motivasi yang berbeda-beda dimana motivasi tersebut berdasarkan kepada ketertarikan atau keinginan para Perangkat untuk menjadi Perangkat Desa Ladang Teungoh dimana ketertarikan tersebut juga disertakan dengan tujuan yang ingin diwujudkan. Sebagian motivasi Perangkat Desa Ladang Teungoh adalah (a) ingin melanjutkan program yang sudah berjalan; (b) ingin mengabdikan diri kepada masyarakat; (c) ingin melayani masyarakat dengan penuh tanggungjawab. Motivasi setiap perangkat berbeda-beda dimana motivasi tersebut berasal dari diri sendiri dan dari dorongan keluarga maupun masyarakat sekitar. Dibalik kebutuhan-kebutuhan tersebut juga terdapat dampak positif dan negatifnya. Dampak positif yang dirasakan yaitu pertama mudah mendapatkan informasi, kedua mendapatkan penghargaan, ketiga mendapatkan keuntungan finansial, keempat, dapat merasakan suatu kepuasan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari desa. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menjadi sorotan masyarakat, selalu menjadi sasaran kecurigaan masyarakat. keterbatasan waktu Bersama keluarga sendiri,

tidak mempunyai waktu istirahat yang cukup karena bekerja sebagai perangkat Desa justru membuat perangkat tersebut lebih banyak memberi waktunya untuk masyarakat bahkan di saat malam tiba pun perangkat harus melayani masyarakat atau mengutamakan masyarakat dibandingkan urusan pribadi perangkat itu sendiri. Akan tetapi itu juga harus dilakukan dengan ikhlas dan bertanggung jawab karena itu terjadi juga bukan karena paksaan dari orang lain melainkan keinginan perangkat tersebut karena sebelum menjabat sebagai perangkat desa tentunya calon perangkat desa sudah memikirkan konsekuensi yang akan terjadi kedepannya setelah menjabat sebagai perangkat desa.

## 5.2 Saran

Terkait penelitian tentang motivasi masyarakat untuk menduduki jabatan perangkat desa (studi kasus Desa Ladang teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan) memberikan beberapa saran:

1. Untuk peneliti agar mengkaji lebih dalam lagi tentang motivasi masyarakat untuk menduduki jabatan perangkat desa khususnya di Desa Ladang Teungoh Aceh Selatan.
2. Untuk perangkat desa harus tetap optimis dalam segala hal yang menyangkut desa dan masyarakat. Tetap menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat, serta dapat melayani masyarakat dengan baik.
3. Untuk masyarakat diharapkan selalu menghargai keputusan-keputusan yang sudah ditentukan oleh perangkat desa agar desa menjadi lebih aman, nyaman dan maju lagi kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Astawa, I Gde pantja. 2008. *Poblematika Hukum Daerah di Indonesia*, Bandung.
- Budiarjo Miriam. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin Burhan. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga university Press.
- Goble G Frank. 1987. *Mazhab Ketiga Psikologi Humanisitik Abraham Maslow*. Penerjemah A. Supratiknya Yogyakarta: Kanisius.
- Hidayat Imam. 2009. *Teori-teori Politik*, Malang: SETARA Press.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2003. *Perencanaan dan pengembangan sumber Daya Manusia*, Bandung: ravika Aditama.
- Maslow Abraham. 1984. *Motivation and Personality (Teori Motivasi dengan Ancangan Hierarki Kebutuhan Manusia)*. Penerjemah Nurul Iman Jakarta: PT Gramedia.
- Nadrilun. 2012. *Megenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka.
- Pitaloka, Rieke Diah. 2004. *Kekerasan Negara Menular Ke Masyarakat*, Yogyakarta:Galang Press.
- Siahaan Hotman. 1986. *Pengantar Kearah Sejarah dan Teori Sosiologi*, Jakarta.
- Sofyan Herminanto dan Uno, B Hamzah. 2012. *Teori Motivasi dan Penerapannya Dalam Penelitian*, Yogyakarta: UNY Press.
- Sudarto. 1995. *Metode Penelitian filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sanapiah Faisal. 2001. *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Gofindo Persada.
- Schultz Duane. 1991. *Psikologi Pertumbuhan: Model-model Kepribadian Sehat*, terj. Yustinus Yokyakarta: Kannisius.
- Tabrani Rusyan,. 2018. *Membangum efektifitas kinerja kepala desa*, Jakarta: bumi aksara.
- Umar Tirtarahadja dan La Sulo. 2012. *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Uno B hamzah. 2007. *Teori Motivasi dan pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahyusumidjo. 1995. *Kememimpinan dan Motivasi*, Jakarta, Graha Indonesia.
- Ziauddin Sardar. 1996. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandug

### Jurnal

Aulia M Rinaldi, skripsi: *Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman*, 2015.

Dedy Mulyadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006).

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, yang dikutip Kembali oleh A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan Dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*.

Jurnal Komunitas Malaysia Journal of Communication Jilid 29(1) 2013.

Pandji Anoraga, *Psikologi Kerja*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2001).

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2016 *Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*.

Putri Lia Sartika, *Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa*, Pekanbaru: 2016, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 02 Juni. 2016.

Permana Sidik, *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Depublis, 2016).

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT)*.

Reza A.A. Wattiwema, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Op.Cit.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000).

Surahmadi, *Strategi Pemenangan Politik Pasangan Idra-Narja dalam Pemilukada Kabupaten Brebes Periode 2012-2012* Vol 7 Nomor 2, 2016.

Suaib Nafir, *Strategi Pemenangan Fahmi Massaira-Lukman dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Majene*, Vol 2 Nomor 2, 2016.

Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Unik* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003).

### Website

Departemen Pendidikan nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-3 (Balai Pustaka, Jakarta Gramedia 2020)

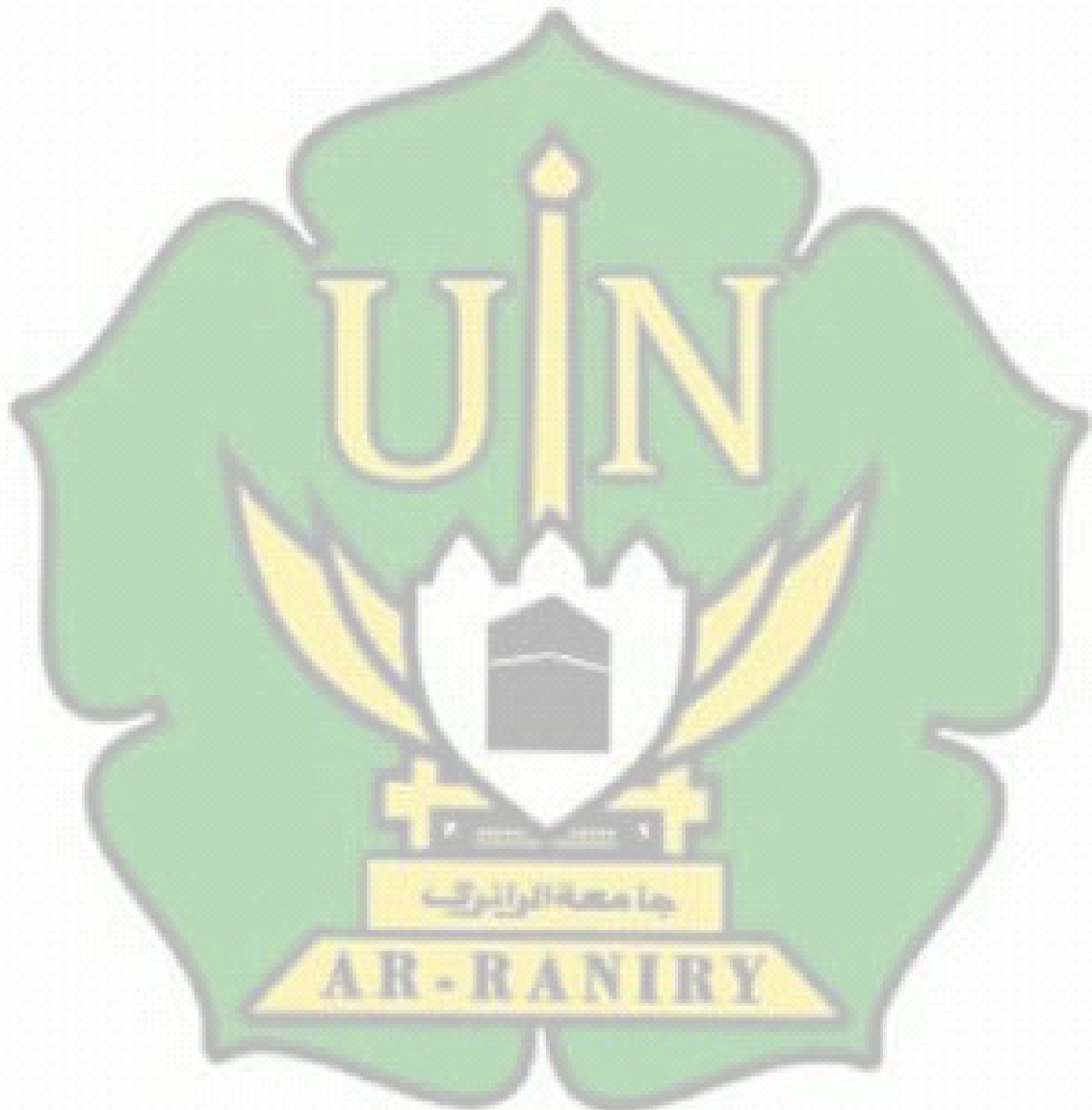
<https://www.gramedia.com/litersi/teori-kebutuhan-maslow/diakses> 16 Juli 2022

<http://aminjaya.desa.id/page/detail/perangkat-desa> diakses 17 Juli 2022

<http://www.juragandesa.net/2019/08/kedudukan-tugas-fungsi-kewajiban/> diakses 30 Desember 2022 time: 19:35

[http://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3065-2962/Kecamatan-Pasie-Raja\\_51229\\_p2k-unkris.html/](http://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3065-2962/Kecamatan-Pasie-Raja_51229_p2k-unkris.html/) diakses 19 Desember 2022

- <http://www.juragandesa.net/2019/08/kedudukan-tugas-fungsi-kewajiban/diakses> Desember 2022 time: 19:35 30
- [http://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3065-2962/Kecamatan-Pasie-Raja\\_51229\\_p2k-unrkris.html/diakses](http://p2k.unkris.ac.id/en3/1-3065-2962/Kecamatan-Pasie-Raja_51229_p2k-unrkris.html/diakses) 19 Desember 2022
- [http://profilbaru.com/Ladang\\_Teungoh,\\_Pasie\\_Raja,\\_Aceh\\_Selatan/diakses](http://profilbaru.com/Ladang_Teungoh,_Pasie_Raja,_Aceh_Selatan/diakses) 19 Desember 2022
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 *Tentang Pemerintahan Desa*
- WJS Poerwadaminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta 2002.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### INSTRUMEN PENELITIAN “Motivasi menjadi Perangkat Desa”

##### Rumusan Masalah:

1. Motivasi?
2. Dampak positif dan negatif menjadi perangkat desa?

##### Motivasi

1. Kebutuhan fisiologis
  - Apakah faktor ekonomi memotivasi bapak/ibu dalam menjadi perangkat desa?
  - Kira-kira bagaimana kondisi ekonomi bapak/ibu sebelum dan sesudah menjadi perangkat desa?
2. Kebutuhan rasa aman
  - Menurut bapak/ibu, dengan menjadi perangkat desa, apakah mungkin mendapatkan perlindungan atau pun keamanan yang lebih?
  - Selama menjadi perangkat desa, apakah bapak/ibu merasa lebih aman? Baik secara fisik maupun mental? Atau sebaliknya, merasa terancam atau tidak?
3. Kebutuhan sosial
  - Apakah kebutuhan sosial mendorong bapak/ibu menjadi perangkat desa?
  - Setelah menjadi perangkat desa, kebutuhan sosial apa yang sudah bapak/ibu dapatkan?
4. Kebutuhan penghargaan
  - Dengan menjadi perangkat desa, menurut bapak/ibu ada tidak penghargaan yang akan didapatkan dari masyarakat?
  - Setelah menjadi perangkat desa, apakah ada penghargaan/pengakuan yang diberikan oleh masyarakat kepada bapak/ibu?
5. Kebutuhan aktualisasi diri
  - Menurut bapak/ibu, potensi apa yang bapak miliki sehingga bapak/ibu pantas untuk menduduki posisi perangkat desa?
  - Apakah dengan menjadi perangkat desa, bapak/ibu merasa potensi bapak/ibu lebih berkembang atau meningkat?

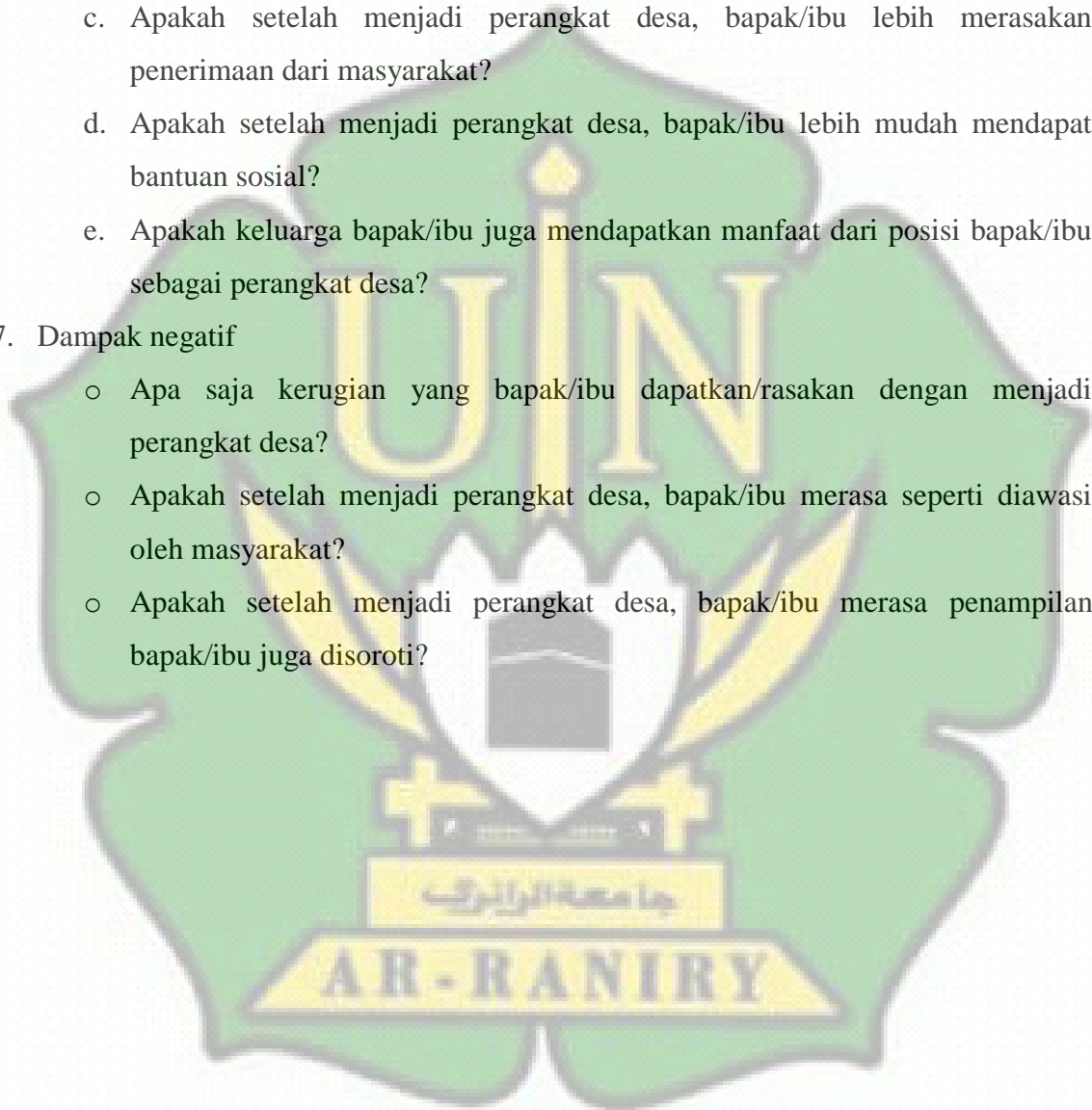
## Dampak Positif dan Negatif

### 6. Dampak positif

- a. Apa saja keuntungan yang bapak/ibu dapatkan/rasakan dengan menjadi perangkat desa?
- b. Apakah setelah menjadi perangkat desa, bapak/ibu lebih mudah mendapatkan informasi?
- c. Apakah setelah menjadi perangkat desa, bapak/ibu lebih merasakan penerimaan dari masyarakat?
- d. Apakah setelah menjadi perangkat desa, bapak/ibu lebih mudah mendapat bantuan sosial?
- e. Apakah keluarga bapak/ibu juga mendapatkan manfaat dari posisi bapak/ibu sebagai perangkat desa?

### 7. Dampak negatif

- Apa saja kerugian yang bapak/ibu dapatkan/rasakan dengan menjadi perangkat desa?
- Apakah setelah menjadi perangkat desa, bapak/ibu merasa seperti diawasi oleh masyarakat?
- Apakah setelah menjadi perangkat desa, bapak/ibu merasa penampilan bapak/ibu juga disoroti?



## Lampiran II

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 260/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2021

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 27 Januari 2021
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk Saudara :  
 1. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. Sebagai pembimbing pertama  
 2. Melly Masni, M.IR Sebagai pembimbing kedua  
 Untuk membimbing skripsi :  
 Nama : Raviqa Della  
 NIM : 170801085  
 Program Studi : Ilmu Politik  
 Judul : Motivasi Masyarakat Untuk Menduduki Jabatan Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Ladang Teugoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 8 Februari 2021

An. Rektor  
 Dekan,

  
 Ernita Dewi



## Lampiran III



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2776/Un.08/FISIP. WD.I/PP.00.9/10/2022  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
 Akademik prodi

Assalamu'alaikum Wr.Wb,  
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RAVIQA DELLA / 170801085  
 Semester/Jurusan : XI / Ilmu Politik  
 Alamat sekarang : Jln Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Motivasi Masyarakat Untuk Menduduki Jabatan Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Oktober 2022  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,  
 Eka Januar, M.Soc.Sc.

AR-RANIRY

## Lampiran IV



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
**GAMPONG LADANG TEUNGOH**  
 KECAMATAN PASIE RAJA

Kode Pos 23755

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 303 /LDT/XI/2022

Geuchik Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: RAVIQA DELLA
NIM	: 170801085
Jenis Kelamin	: Perempuan
Prodi	: Ilmu politik
Pekerjaan	: Mahasiswa/i

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas **Benar** telah melaksanakan Penelitian di Desa Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan selama 14 Hari Tahun 2022 dengan Judul : **Motivasi Masyarakat Untuk Menduduki Jabatan Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)**

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya .

Dikeluarkan di: Ladang Teungoh  
 Pada Tanggal : 02 November 2022  
 Geuchik Ladang Teungoh



**Lampiran V****Dokumentasi wawancara Dengan Sekretaris Desa****Dokumentasi wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa****Dokumentasi wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa**



**Dokumentasi wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa**



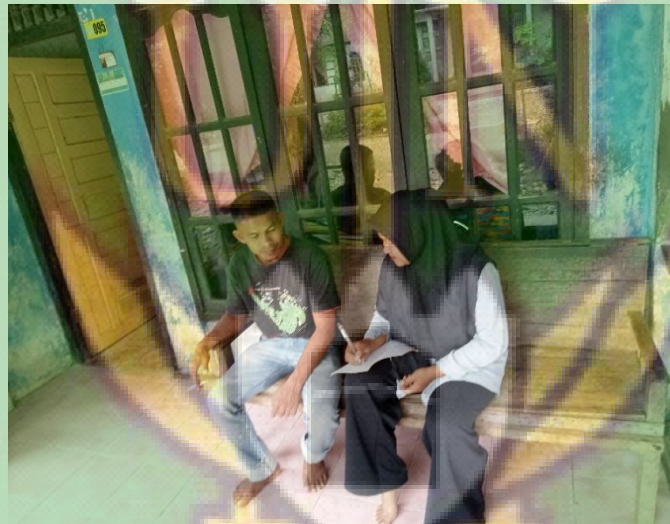
**Dokumentasi wawancara dengan Kaur Umum Desa**



**Dokumentasi wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa**



**Dokumentasi wawancara dengan Kepala Dusun Bawah**



**Dokumentasi wawancara dengan Kepala Dusun Tengah Desa**



**Dokumentasi wawancara dengan Kaur Keuangan Desa**



**Dokumentasi Perangkat Desa Ladang Teungoh, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.**

